

EDISI 54 / 2019

EDUKASI

K E U A N G A N

SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

*Diseminasi karya tulis akademisi
atas hasil pengabdian kepada masyarakat*



DAFTAR ISI

SALAM REDAKSI	3
LINTAS PERISTIWA	4
LIPUTAN UTAMA	6
LIPUTAN KHUSUS	15
PROFIL	19
SERAMBI ILMU	26
TAHUKAH KAMU	39
KOLOM <i>SOFTSKILL</i>	42
CERITA ALUMNI	44
TIPS & TRIK	46
MATA AIR	51
KESEHATAN	54
<i>POINT OF INTEREST</i>	56
RESENSI	60
GALERI	62
KANG EDU	64

Susunan Redaksi

PENANGGUNG JAWAB

Sekretaris BPPK

PEMIMPIN REDAKSI

Sugeng Satoto

SEKRETARIAT

Abdul Aziz Maghfur

Dodi Septariza

Naseh Iskandar

Eko Supriyono

Fitria Sri Wulandari

Thalia Maudina

REDAKTUR

Hartono

Kristian Agung Prasetyo

Sintawati

Arfin

Inwan Hadiansyah

Irwandi Hidayat

Ferry Irawan

Eko Prasetyo

Setyawan Dwi Antoro

Andi Manaek

Daniel Pangaribuan

Tri Wibowo

Rachmatunnisya

Sunardi

Rio Suareski

Eri Haryanto

Pilar Wirotama

EDITOR

Sudrajat

Ari Sandi Robert

Retyan Laksita Mutiary

Ardes Martua Sitanggang

Yohana Tolla

Imam Asma Nur Alam Marbun

Ridwan Sidik Kurniawan

Bima Lingga Sakti

Luqman Hakim

Arimbi Putri

DESAIN GRAFIS & FOTOGRAFER

Muhammad Fath Kathin

Victorianus M. I. Bimo Adi

Seno Adi Nugroho

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam huruf Arial 11 spasi 1,5, maksimal 2.500 kata.

Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@kemenkeu.go.id.

Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

ALAMAT REDAKSI

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan 12110

Telp: +62 21 7394666, 7204131

Fax: +62 21 7261775

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

UJIAN SERTIFIKASI AHLI KEPABEANAN

Berusia minimal
18 tahun

Berijazah minimal
SMA/ sederajat

Memenuhi kelengkapan
berkas administrasi

Melakukan pendaftaran
sesuai batas waktu

Membayar PNBP
sebesar Rp 1.000.000

Persyaratan Peserta

**Pengusaha pengurusan jasa
Kepabeanaan harus memiliki
minimal 1 ahli Kepabeanaan
untuk bisa mendapatkan
akses Kepabeanaan**

DILAKSANAKAN PADA:

- Februari
- Juni
- Oktober

FOLLOW US:  @pusdiklatbc

 @PusdikBC

 Pusdiklat Bea dan Cukai



SALAM REDAKSI

Hakikat dari seluruh pegawai negeri sipil (PNS) adalah pengabdian, baik itu mengabdikan kepada negara maupun masyarakat. Tak terkecuali PNS yang berada di lingkungan pendidikan tinggi, seperti Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) yang merupakan unit di bawah BPPK. Untuk itulah PKN STAN mengadakan sebuah seminar nasional yang tergolong unik dengan mewadahi hasil dari pengabdian masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

Ilah Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (Sembadha) yang dapat Anda nikmati ulasannya pada sajian "Liputan Utama" Majalah Edukasi Keuangan edisi 54 kali ini. Berbagai karya hasil pengabdian masyarakat yang menarik dipresentasikan dalam seminar tersebut yang diharapkan dapat menumbuhkan semangat pengabdian pada diri setiap individu.

Di rubrik "Liputan Khusus" kita beralih dari pengabdian kepada masyarakat ke pengabdian kepada instansi. Talent Development Program yang diselenggarakan Pusdiklat PSDM, menjadi salah satu wujud komitmen BPPK untuk mengembangkan pemimpin-pemimpin yang inspiratif.

Tak hanya dari pimpinan, kisah inspiratif hadir pula melalui pelaksana-pelaksana berprestasi. Simak narasinya dalam rubrik "Profil" yang menyajikan tiga arjuna peraih Pegawai Pelaksana Teladan BPPK 2019, Novan Herdiyanto, Mohammad Iqbal, dan Fakhruddin. Melalui "Cerita Alumni", Anda juga akan disuguhkan kisah seorang karyawan yang menyentuh meski tidak menempuh pendidikan di luar negeri.

Usai membaca sejumlah tulisan edukatif, mata Anda akan dimanjakan dengan lukisan alam Bali pada rubrik "Galeri" dan dihibur melalui rubrik "Point of Interest", "Teka-teki Edukasi", dan "Kang Edu". Selamat menikmati seluruh rangkaian suguhan dari Majalah Edukasi Keuangan dan semoga menginspirasi!

September - Oktober



FESTIVAL BUDAYA BANGGA BPPK

BPPK menyelenggarakan acara Festival Budaya Bangsa BPPK dengan mengusung tema #AkuBPPK. Acara yang berlangsung selama tiga bulan (Juli - September 2019) ini bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta dan memiliki (*sense of ownership*) bagi seluruh pegawai di lingkungan BPPK.

BPPK LAKUKAN AKREDITASI LEMBAGA PELATIHAN KEUANGAN NEGARA PADA BPSDM PEMPROV DKI

BPPK melakukan kegiatan akreditasi pada pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Pemprov DKI Jakarta. Pengawasan akreditasi lembaga pelatihan yang dimaksud meliputi pelatihan dalam bidang pengelolaan keuangan negara, salah satunya Pelatihan Bendahara Pengeluaran.



BPPK JALIN KERJA SAMA PENGEMBANGAN SDM DENGAN JPPH MALAYSIA

BPPK menjalin kerja sama teknik (*technical cooperation*) dengan Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) Malaysia di bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kesepakatan itu tercapai dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dari kedua belah pihak yang berlangsung di Novotel Bogor.

MENTERI KEUANGAN MELANTIK 5 PEJABAT BPPK

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani melantik sebanyak 129 Pejabat Eselon III di lingkungan Kementerian Keuangan yang berlokasi di Gedung Dhanapala Kemenkeu. Para pejabat tersebut berasal dari Sekretariat Jenderal (Setjen), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).



ORASI ILMIAH WIDYAIKWARA BPPK DI LAN

Sebanyak empat widyaiswara dari BPPK menjalani orasi ilmiah di Lembaga Administrasi Negara (LAN) selama dua hari, Selasa (3/9) hingga Rabu (4/9). Mereka adalah Bjardianto Pudjiono, Rudy Widodo, Muhammad Haniv, dan Agus Suharsono.



FOTO :
ABDUL 'AZIZ MAGHFUR
SENO ADI NUGROHO
LUQMAN HAKIM



YOHANA TOLLA

Pengabdian Masyarakat, Sumbangsih Perguruan Tinggi untuk Indonesia

2019 dikenal sebagai tahun politik, tahun perhelatan pesta demokrasi lima tahunan dilaksanakan. Di tengah hiruk pikuk pesta demokrasi, pemerintah menetapkan bahwa tahun 2019 adalah tahun pembangunan sumber daya manusia. Hal ini diwujudkan dalam APBN, di mana salah satu fokus APBN 2019 adalah pembangunan SDM. Mengusung tema “APBN untuk Mendorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan (Investasi) Sumber Daya Manusia”, belanja negara diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan program perlindungan sosial, penyelesaian pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta penguatan desentralisasi fiskal (Dikutip dari “APBN Dorong Investasi dan Daya Saing Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”, kominfo.go.id). Lebih lanjut dinyatakan bahwa penajaman anggaran pendidikan diwujudkan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi dan penyelarasan dengan kebutuhan industri, serta pengalokasian dana abadi penelitian.

Sejalan dengan tema APBN, Kementerian Ristekdikti melalui Ditjen Penguatan Riset dan Pengembangan memprogramkan “Penguatan Riset dan Pengembangan” di mana sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2019 di antaranya meningkatnya produktivitas riset litbang dan pengabdian masyarakat dan meningkatnya produktivitas riset pendidikan tinggi dan pengabdian masyarakat. Di tataran pendidikan tinggi, sasaran strategis tersebut tercermin dalam tri dharma pendidikan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 UU No. 12 Tahun 2012, Tri Dharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam UU No. 12 Tahun 2012, yang dimaksud dengan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasilnya digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.

Mengacu pada pasal 57 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat. Adapun hasil yang diharapkan dari pengabdian kepada masyarakat bisa berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

PENGABDIAN MASYARAKAT DI PKN STAN

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, PKN STAN membentuk Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM). PPPM merupakan unsur pelaksana akademik dan non akademik yang bertanggung jawab kepada direktur dan secara teknis pembinaan dilakukan oleh pembantu direktur bidang akademik. Tugasnya adalah melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan keahlian serta berperan serta dalam pengembangan karya ilmiah di bidang keuangan negara. Sepanjang tahun 2019, PPPM telah melakukan beberapa kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pongkok, Pendampingan Pengelolaan Dana Bos Kabupaten Magelang, dan *Workshop* Kurikulum Akuntansi Guru-Guru

SMK Provinsi DKI Jakarta. Untuk mempublikasikan serta mengapresiasi kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, maka PKN STAN menyelenggarakan Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Sembadha).

Memasuki tahun kedua, Sembadha diharapkan dapat menjadi wadah kerjasama antara perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah dan pelaku lain dalam upaya diseminasi dan kerjasama kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Seminar ini diselenggarakan pada tanggal 10-11 Oktober 2019 dengan target peserta dari perguruan tinggi di Indonesia. Selama dua hari pelaksanaan, kegiatan diisi dengan parallel session, diskusi praktik/ implementasi kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, seminar nasional, serta *Public Sector Innovation Exhibition*.

Penyelenggaraan seminar ini bertujuan untuk mewujudkan keunggulan program pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan angka partisipasi dosen, peneliti dan mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, memberikan wadah bagi para dosen, peneliti dan mahasiswa pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk dapat mempresentasikan dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat luas untuk dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, serta meningkatkan jumlah publikasi ilmiah sivitas akademika dalam jurnal nasional dan internasional yang dikembangkan dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil dari seminar ini adalah publikasi artikel ilmiah hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen, peneliti, dan mahasiswa di perguruan tinggi atau peserta seminar lainnya dalam bentuk prosiding dan jurnal.



SEMBADHA 2019: Torehkan Pengmas di Atas Kertas

Kegiatan Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (Sembadha) dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk seminar yang unik dan menarik. Tidak banyak lembaga pendidikan yang menginisiasi seminar serupa, oleh karenanya antusiasme peserta sangat tinggi. Bahkan, di tahun kedua penyelenggaraannya, pendaftar yang mengumpulkan artikel ilmiah (*paper*) hasil pengabdian masyarakat ini meningkat lebih dari dua kali lipat pendaftar pada tahun lalu.

Person in Charge (PIC) Call for Paper Sembadha, Dyah Purwanti mengatakan, pelaksanaan Sembadha 2019 ini jauh matang dibandingkan tahun sebelumnya. Selain karena memasuki pelaksanaan kedua, publikasi kali ini dilakukan secara lebih massif dan intensif untuk menjangkau kesadaran (*awareness*) internal dan eksternal, serta memancing minat peserta yang lebih luas. Meski Sembadha

tahun ini bertema “Akuntabilitas Laporan Keuangan BUM Desa dalam rangka Mewujudkan BUM Desa yang Profesional sebagai Pilar Ekonomi Desa”, tema paper yang masuk tidak dibatasi pada tema keuangan.

“Pokoknya kita publikasi sampe orang *mblenger* (bosan) lah liatnya. Paling tidak kan orang jadi tahu dan terinformasi. *Paper* yang masuk pun bagus-bagus, temanya menarik-menarik, dan tidak terbatas pada keuangan negara, pokoknya pengmas (pengabdian masyarakat) secara umum,” tuturnya.

Hingga batas akhir pengumpulan artikel pada September lalu, tercatat 208 tulisan yang masuk, dan 145 tulisan yang lolos presentasi dan masuk ke dalam *proceeding*. Paper tersebut terdiri dari 107 tulisan yang akan dipresentasikan secara oral, dan 38 paper yang disajikan dalam bentuk poster.

Seluruh paper tersebut dibagi ke dalam beberapa bidang kajian besar, di antaranya 10 paper bidang pertanian, perikanan, dan kelautan; 11 paper bidang lingkungan hidup dan manajemen bencana; 10 paper tentang kesehatan; 44 paper bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, sosial, dan budaya; 11 paper bidang teknologi terapan, teknologi informasi dan komunikasi; serta 21 paper bidang pendidikan.

Dengan banyaknya artikel yang masuk sedangkan waktu pelaksanaan presentasi hanya satu hari, maka artikel yang lolos tersebut dibagi ke dalam dua macam presentasi, yakni oral dan poster. Dyah pun menuturkan, pembagian ini dilihat berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, ada tulisan tertentu yang lebih cocok dipresentasikan dalam bentuk poster, serta nilai *paper*-nya pada kisaran 280-300.

“Ada juga penulis yang mengirimkan lebih dari satu tulisan, misalnya tiga tulisan,

yang satu dijadikan poster, yang dua lagi presentasi oral. Tapi justru bisa kita lihat yang presentasi poster justru malah yang rame,” tambah dia.

Dari 145 tulisan tersebut, dipilih tiga paper terbaik yang idenya paling kreatif dan memiliki kebermanfaatan yang tinggi. Seluruh paper ditinjau oleh dua orang *blind reviewer* yang berasal dari PKN STAN dan juga 12 instansi yang menjadi co-host dalam seminar tersebut, antara lain Universitas Serang Raya (Unsera), Universitas Pancasila, Universitas Lancang Kuning (Unila), Universitas Pembangunan Jaya (UPJ), dan Universitas Pamulang. Dari dua orang reviewer tersebut, nilainya akan diakumulasi dan diambil tiga paper dengan nilai tertinggi. Lantas bagaimana paper yang baik untuk pengabdian masyarakat tersebut?

“Kita kan kalau pengmas itu yang penting kebermanfaatannya terasa. Jadi tidak hanya melakukan pengabdian masyarakat

FOTO :
LUQMAN HAKIM

seperti sosialisasi, trus ya sudah. Artikel yang baik, *output* dan *outcome*-nya benar-benar terukur. Misalnya terkait pengisian SPT (pajak), tidak hanya sampai sosialisasi, tapi sampai masyarakat itu bisa mengisi SPT sendiri,” ujar Dyah mencontohkan.

Adapun tulisan dengan nilai tertinggi yang menjadi *best paper* kategori presentasi oral adalah:

1. Sutarti dan Ratu Dea Mada Badriyah (Universitas Serang Raya) dengan judul paper “Peningkatan *Added Value* bagi Petani Melalui Produksi Kompos Jerami di Kelurahan Terondol Kota Serang”;
2. Etik Anjar Fitriarti (Universitas Gadjah Mada) dengan judul paper “*Community Development* di Bidang Kesehatan Bertajuk ‘Menyapa Indonesia’ (Deskriptif Kualitatif Program Arisan Jamban pada Masyarakat di Dukuh Sebatang, Desa Hargotirto, Kokap, Kulonprogo)”;
3. Dian Pratama dan Wulan Ruhyyih Khanum (Universitas Airlangga) dengan judul paper “Ngerandu Surupe dan Srengenge Inovasi Pelestarian Budaya Suku Using di Kecamatan Singojuruh”.

Sementara tulisan dengan nilai tertinggi yang menjadi *best paper* kategori poster adalah:

1. Muhami, Syahril Makosim, Darti Nurani, dan Indrati Sukmadi (Institut Teknologi Indonesia) dengan judul paper “Profil UMKM Keripik Pisang dan Kembang Goyang Kelurahan Keranggan, Kota Tangerang Selatan”;
2. Supriyati, Deden Abdul Wahab Sya’roni, dan Ramadhan Syaeful Bahri (Universitas Komputer Indonesia) dengan judul paper “Manajemen Tata Kelola Potensi Bumdes sebagai Akuntabilitas Pilar Ekonomi Desa”;
3. Listya Sugiyarti, Nur Asmilia, Sri Nitta Crissiana Wirya Atmaja, Siti Hanah, dan Wiwit Irawati (Universitas Pamulang) dengan judul “Financial Attitudes, Education Level in Family Financial Management in Somodaran District Communities Yogyakarta”.

“Pokoknya kita publikasi sampe orang *mblenger* (bosan) lah liatnya. Paling tidak kan orang jadi tahu dan terinformasi. Paper yang masuk pun bagus-bagus, temanya menarik-menarik, dan tidak terbatas pada keuangan negara, pokoknya pengmas (pengabdian masyarakat) secara umum.”

MEMBENTUK APARAT NEGARA BERJIWA ABDI

Pengabdian masyarakat memang menjadi salah satu butir dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karenanya, diharapkan “roh” pengabdian itu sendiri harus benar-benar tertanam dalam masing-masing individu, khususnya di internal PKN STAN sebagai salah satu institusi pendidikan. Itu pula yang menjadi harapan tersirat Dyah pada pelaksanaan Sembadha ini.

“Kita kan yang mengadakan PKN STAN ya, paling tidak kita menginternalisasi dulu kepada teman-teman kita di sini untuk giat melakukan pengmas. Terutama kayak menginspirasi lah. Di sini kita sebagai ibaratnya orang yang punya ilmu, kita menunjukkan kebermanfaatannya untuk masyarakat sekitar,” ucapnya.

Selain internal pegawai, kegiatan ini juga diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi para mahasiswa. Oleh sebab itu, mahasiswa diwajibkan hadir pada kegiatan ini untuk menambah wawasan bahwa banyak yang dapat dilakukan terkait keilmuan dan kapasitas mereka saat ini. Pada pelaksanaan kegiatan baik pada saat presentasi maupun seminar nasional, sejumlah mahasiswa tampak memadati area acara. Tak sedikit pula dari mereka yang nampak tertarik dan antusias bertanya pada para penyaji.

Dyah sekaligus berharap, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak sekadar berlalu, atau bahkan disalahartikan. Dosen Jurusan Akuntansi itu pun menekankan, pengabdian masyarakat harus yang benar-benar berbobot dan memiliki *benefit* untuk publik yang disasarinya. “Kebanyakan hanya sebatas sosialisasi di mana, dianggap pengmas. Ngajar yang di luar tusinya, dianggap pengmas. Padahal kan bukan itu definisi pengmas yang sebenarnya,” urai dia.

Dengan demikian, Sembadha juga bisa menyebarkan inspirasi positif di bidang pengabdian masyarakat kepada para akademisi dan masyarakat pada umumnya. Kegiatan ini pun diharapkan terus dilakukan secara kontinu, bahkan tidak harus dilakukan di Kampus Ali Wardhana tersebut. “Jadi Sembadha ini semacam kegiatan bersama dengan para co-host tadi,” terang Dyah.

Manfaat positif lain yang dapat diambil dari kegiatan ini yaitu memperluas relasi. PKN STAN yang terhitung baru dalam bentuk perguruan tinggi, tak dipungkiri memerlukan jaringan relasi yang luas dan menggaungkan namanya di penjuru negeri. Hal ini didapatkan melalui persebaran peserta Sembadha yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, hingga ke ujung timur kepulauan Tanah Air.



FOTO :
DOK. PKN STAN

“Kita kalau pengmas itu yang penting kebermanfaatannya terasa. Jadi tidak hanya melakukan pengabdian masyarakat seperti sosialisasi, trus ya sudah. Artikel yang baik, output dan outcome-nya benar-benar terukur.”



FOTO :
DOK. PKN STAN

FITRIA SRI WULANDARI

KERAGAMAN TEMA DALAM



MENGAMBIL PERAN
GUNA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Sebagai bentuk apresiasi atas kegiatan pemberdayaan masyarakat, Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) menyelenggarakan Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Sembadha) 2019 yang merupakan wadah kerja sama antara perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah, dan pelaku lain dalam upaya diseminasi dan kerja sama kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sembadha di tahun kedua diikuti sekitar 208 *paper* dengan tema-tema yang lebih luas dari tahun lalu dan yang memenuhi penilaian untuk diikuti dalam Sembadha ini sebanyak 145 *paper*. Seluruh *paper* peserta hasil pengabdian kepada masyarakat dipresentasikan, ada yang ke dalam pameran poster di satu ruangan dan ada yang dipresentasikan per program di kelas-kelas yang terpisah secara bergantian.

Peserta begitu antusias mempresentasikan poster program pengabdian mereka kepada. Suharyadi, Dosen Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Fakultas Teknologi Informasi, yang juga bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Komputerisasi Akuntansi di kampusnya tersebut menjelaskan begitu bersemangat terkait program pengabdian masyarakat yang dikelola dirinya bersama timnya. Posternya berjudul "Internet Sehat: Solusi Bijak Masyarakat desa Dopleng, Kabupaten Boyolali". Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Ramadhan tahun 2019 dan berharap kegiatan ini berlangsung seterusnya serta meluas ke desa-desa lainnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam rangkaian acara Festival Ramadhan Pasar Sore yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa Bareng Nyawiji.

Suharyadi menjelaskan tujuan program ini adalah untuk menumbuhkan dan membangun kesadaran masyarakat desa atas ancaman dampak negatif internet, menguatkan citra internet sebagai media pembelajaran dan penyebaran informasi yang berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan anak-anak,

serta memberikan informasi yang memadai bagi orang tua dalam menyikapi dan mewaspadaai dampak negatif dari internet bagi anak-anak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan metode ceramah dan *sharing* pengalaman tentang penggunaan internet sehat dari tim pengabdian, pemutaran film pendek, dan praktik internet sehat. Hasil kegiatan ini adalah masyarakat Desa Dopleng memiliki pemahaman tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan internet. Dampak negatif yang dapat dicegah sejak dini sedangkan dampak positif dari internet dapat terus digalakkan untuk memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta tambahan pendapatan melalui bisnis *online*.

"Kegiatan semacam ini masih berjalan terus sampai dengan saat ini, kami bekerja sama dengan komunitas setempat dan dari Dinas Bidang Komunikasi dan Informatika yang memiliki tujuan yang sama seperti kami dengan harapan semakin meluas budaya internet sehat. Penggunaan internet sehat adalah solusi bijak bagi warga desa untuk mencegah dampak negatif dari internet. Internet diharapkan dapat membantu warga desa untuk mencari informasi untuk menambah wawasan di segala bidang agar kesenjangan informasi dapat diatasi sehingga internet dapat memberikan dampak yang benar-benar positif untuk penggunaannya," ungkap Suharyadi.

Beralih ke rangkaian kegiatan yang lain, yaitu paralel *session* sebagai bagian Sembadha 2019 menyajikan presentasi *paper* dengan berbagai tema juga. Salah satunya dari *cluster* pertanian, perikanan, dan kelautan yang berjudul "Penerapan Horinet dan Vertinet untuk Peningkatan Produksi Rumput Laut dan Pengembangan Desa Wisata Bahari" oleh tim dari Universitas Halu Oleo.

Ma'ruf Kasim sebagai salah satu anggota tim yang mewakili timnya untuk hadir di Sembadha, menceritakan program pengabdian masyarakat yang telah dilakukan mereka di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Inovasi yang dilakukan dilatarbelakangi karena melihat



FOTO :
DOK. PKN STAN



permasalahan yang terjadi di masyarakat setempat.

Budidaya rumput laut di Sulawesi Tenggara sangat besar sekali. Hampir semua masyarakat desa pesisir di sana membudidayakan rumput laut. Namun, persoalan yang muncul adalah masyarakat di sana masih menggunakan botol plastik bekas sebagai pelampung dengan tali sebagai alat budi daya rumput laut sehingga botol-botol tersebut menjadi sampah yang mengapung di laut. Botol-botol ini membuat laut, pantai tidak menjadi "cantik" lagi. Berdasarkan hasil penelitian, dengan menggunakan botol plastik yang dirangkai menggunakan tali mengakibatkan rumput laut yang sedang dibudidayakan mudah terkena hama ikan sehingga penghasilan masyarakat menurun 60% karena rumput laut yang sudah digigit ikan tidak akan berkembang dengan baik.

Melihat dua permasalahan serius ini, akhirnya Ma'ruf Kasim dan tim membuat inovasi budi daya rumput laut untuk memberikan solusi atas permasalahan tersebut, yaitu dengan menciptakan alat yang dinamakan vertinet dan horinet. Vertinet merupakan budi daya menggunakan ruang bawah laut dengan pipa paralon dan jaring yang membentuk kantung persegi empat memanjang secara vertikal ke dasar perairan dengan rangka utama dari pipa paralon sedangkan horinet merupakan alat budi daya rumput laut yang membentuk kantung persegi empat memanjang secara horisontal dipermukaan laut dengan rangka utama dari pipa paralon. Alat tersebut bisa menjadi tempat budi daya rumput laut masyarakat dan rumput laut masyarakat tidak akan terserang hama dan juga tidak akan mengotori lingkungan karena tidak menggunakan botol plastik bekas yang menyebarkan sampah di lautan. Alat ini sudah dipatenkan, masyarakat dengan gratis dapat menggunakannya dengan meminta izin terlebih dahulu.

Tujuan program ini untuk meningkatkan budidaya rumput laut. Selain itu, dapat menjaga pantai dan laut tetap indah dari sampah plastik. Pantai semakin indah

dengan adanya budidaya rumput laut yang ditata dengan sistem kurungan yang baik tertata rapi itu akan menjadikan tempat ini menjadi objek wisata. Selain menjadi objek wisata, berbagai macam kuliner dapat diolah dari rumput laut yang dapat dinikmati sembari memandangi keindahan. Masyarakat pun bisa menjadikan ini sebagai sumber penghasilan mereka.

Pengembangan wisata berbasis rumput laut ini menjadi percontohan nasional, percontohan kegiatan pengabdian masyarakat yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini didukung dan didanai oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Program Kemitraan Wilayah, yaitu kerja sama antara Lembaga Peneliti dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo dengan Bapada Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.

"Alasan mengikutsertakan di program Sembadha dikarenakan Sembadha ini merupakan seminar yang khas dengan unsur pengabdian kepada masyarakat karena seminar-seminar yang pernah saya ikuti tidak ada yang seperti ini, ini yang menarik, yang khas di Sembadha ini. Jadi, saya rasa memang ini adalah tempat teman-teman untuk mempublikasikan hasil-hasil pengabdian mereka kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya sangat tertarik mengikuti Sembadha ini," ujarnya.

"Hal sekecil apapun yang kita lakukan selama itu bermanfaat untuk kepentingan masyarakat maka akan bernilai ibadah," tambah Dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan ini.

DHARMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN selain sebagai tempat melahirkan SDM Indonesia yang cerdas dan andal dalam pengelolaan keuangan negara, juga melakukan peran pencerdasan masyarakat, dharma pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Sembadha tahun ini menghadirkan perwakilan desa untuk memberikan testimoni akan program-program yang dilaksanakan untuk mengembangkan desanya. Joko Winarno, Direktur Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri, Ponggok dan Johan Wahyudi, Kepala Desa Sawangan berbagi "rasa bangga" akan desanya di hari terakhir dalam rangkaian kegiatan Sembadha 2019. Kedua desa tersebut adalah desa yang telah "disentuh" oleh PKN STAN.

MUMBUL SAKA MUMBUL MAKMUR: MEMBUMI ALA DESA PONGGOK

Joko Winarno, salah satu sosok pemuda Desa Ponggok yang menginspirasi. Dirinya rela meninggalkan pekerjaannya yang sudah dijalannya selama sepuluh tahun untuk kembali ke desanya karena keinginan kuatnya untuk membangun desanya, membuat desanya semakin berkembang dengan masyarakat yang semakin sejahtera. Dirinya dengan pemerintah desa melakukan pengabdian untuk masyarakat desanya, yaitu di Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah. Desa Ponggok adalah desa dengan mayoritas pencaharian masyarakatnya itu bertani.

Desa Ponggok memiliki empat sumber mata air, salah satunya menjadi sumber dengan debit dan kualitas yang berbeda, salah satunya menjadi sumber pengolahan air minum kemasan ternama di Indonesia. Dengan potensi alam seperti ini, membuka peluang besar untuk dikembangkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga desa. Langkah yang dilakukan dengan mengubah desa pertanian menjadi desa wisata melalui dibentuknya Badan Usaha Milik (BUM) Desa dengan mengelola bantuan dana desa dari pemerintah. Dengan bermodalkan kemauan dan komitmen akhirnya desa yang dulunya miskin bisa menjadi desa yang berkembang.

Sembilan unit usaha telah berhasil dikembangkan di Desa Ponggok sejak tahun 2009. Selain itu, menggerakkan

ibu-ibu PKK melalui Usaha Mikro Kecil Kenengah (UMKM). Desa Ponggok juga memiliki program "Satu Rumah Satu Sarjana" untuk meningkatkan sumber daya manusia masyarakat desa. Kesehatan masyarakat desa pun sangat diperhatikan dengan BPJS warga yang dibayarkan oleh pemerintah desa.

Saat ini, Desa Ponggok sudah berkembang semakin baik. Perubahan desa dari desa miskin ke desa yang lebih baik sangat diapresiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sehingga Desa Ponggok menjadi desa percontohan nasional.

Joko Winarno yang mewakili Desa Ponggok dalam kegiatan Sembadha ini pun mengungkapkan rasa terima kasih atas segala pendampingan yang diterima desanya. Salah satunya pendampingan kepada Desa Ponggok diberikan oleh Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN, yaitu dengan mendampingi dalam mengelola keuangan yang transparan karena masyarakat Desa Ponggok yang paham akuntansi itu sedikit sekali. Dikarenakan perkembangan Desa Ponggok yang pesat maka berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat yang semakin meningkat sehingga diperlukan SDM yang mampu mengelola keuangan dan pelaporan yang baik yang transparan.

"Pendampingan dari Politeknik Keuangan Negara STAN, kami dapat melakukan pelaporan yang baik dengan dengan standar akuntansi yang Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yang kami tetapkan di peraturan desa," ungkapnya.

Desa Ponggok akhirnya memiliki SDM yang mampu mengelola keuangan desanya dengan baik. Hal ini pun terbukti, ketika diaudit oleh akuntan independen eksternal, hasilnya secara nasional Desa Ponggok adalah desa pertama dengan BUM Desa yang mendapat opini Wajar dengan Pengecualian.

"Terima kasih PKN STAN," tambahnya.

PENGGALIAN POTENSI DESA SAWANGAN

Desa Sawangan adalah salah satu desa di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa Sawangan yang memiliki tanah yang subur dan sumber air yang melimpah, berpotensi menjadi destinasi wisata baru di Magelang ini merupakan desa yang juga menjadi lokasi pengabdian bagi PKN STAN. Tim Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) dan Dosen Jurusan Manajemen Keuangan PKN STAN saling bekerja sama untuk menggali potensi yang dimiliki oleh Desa Sawangan. PKN STAN banyak memberi saran, masukan, dan pendampingan sehingga bisa menjadi seperti Desa Ponggok. Selain itu, pemerintah Desa Sawangan juga melakukan studi banding ke Desa Ponggok (2016 – 2017).

"Terima kasih PKN STAN karena sudah banyak memberi saran, masukan, memberi inspirasi, dan sudah memberikan pendampingan sehingga desa kami bisa menjadi seperti Desa Ponggok," jelas Johan Wahyudi, Kepala Desa Sawangan ini.

Sembadha menjadi momen dimana dirinya bisa berbagi kisah desanya kepada para peserta Sembadha yang mayoritas dihadiri mahasiswa. Harapan dengan adanya Sembadha ini adalah para mahasiswa dapat membangun desanya menjadi semakin maju.

Sembadha tahun ini menghadirkan perwakilan desa untuk memberikan testimoni akan program-program yang dilaksanakan untuk mengembangkan desanya.

ANDITA TRIAS NUR AZIZAH

**MENCETAK PEMIMPIN
YANG INSPIRATIF MELALUI
TALENT DEVELOPMENT
BPPPK**

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pusdiklat PSDM) sebagai salah satu unit di bawah Kemeterian Keuangan mempunyai visi mulia yaitu menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas dunia dalam diklat kepemimpinan, diklat penjenjangan pangkat, diklat peningkatan kompetensi, pengelolaan beasiswa, dan pengelolaan tes. Sebagai perwujudan visi Pusdiklat PSDM untuk menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas dunia dalam diklat kepemimpinan tersebut, Pusdiklat PSDM mengadakan Program Pengembangan Talent sesuai dengan amanat Menteri Keuangan yang tertuang dalam KMK Nomor 1227/KM.1/2016 tentang Pedoman Pengembangan Talent dan Mekanisme Mentoring dalam Manajemen Talenta Kementerian Keuangan. Program Pengembangan Talent ini telah dilaksanakan di dua unit Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Tahun 2019 merupakan tahun pertama terselenggaranya Program Pengembangan Talent atau *Talent Development Program* Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). Jika pada tahun sebelumnya *Talent Development Program* diadakan untuk pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, pada Agustus 2019 lalu *Talent Development Program* juga diselenggarakan untuk pegawai di lingkungan BPPK.

Talent Development Program BPPK merupakan kegiatan yang ditujukan untuk para pegawai dan pejabat di lingkungan BPPK yang diproyeksikan menduduki jabatan lebih tinggi dari posisinya saat ini. Program ini terdiri atas beberapa tahapan yakni *Workshop* Persiapan Mentor dan Talent, Pelatihan Kompetensi Teknis dan Manajerial Inti (*e-Learning*), *Workshop* Kompetensi Manajerial (*Profesional*) dan Sosio Kultural (Level *Basic*), Implementasi *Individual Development Plan* (IDP) dan Evaluasi *Implementasi Individual*

Development Plan. Peserta pada program ini terbagi dalam 2 (dua) level *talent*, level *basic* dan level *intermediate*. Level *basic* untuk para calon eselon IV dan level *intermediate* untuk para calon eselon III.

Workshop Persiapan Mentor dan Talent

Tahapan pertama program *Talent Development Program* ialah memilih mentor dan *talent*. Mentor dan *talent* dipilih dan ditetapkan oleh Sekretariat BPPK sebagai pengelola manajemen talenta. Mentor tetap merupakan atasan langsung *talent*, sedangkan mentor tidak tetap merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Sekretariat Badan sebagai pengelola manajemen talenta. Kegiatan pertama yang dilakukan oleh para *talent* dan mentor yaitu *Workshop* Persiapan Mentor dan *Talent*. *Workshop* ini bertujuan untuk menyiapkan para *talent* dan mentor agar para *talent* bisa menjadi *talent* yang menginspirasi bagi lingkungan kerjanya dan para mentor bisa melakukan *mentoring* yang efektif, khususnya bagi *talent* yang dibinanya.

Workshop Persiapan Mentor dan *Talent* dilaksanakan selama 1 (satu) hari. Narasumber dalam *workshop* ini merupakan praktisi yang ahli di bidangnya dimana para mentor dan *talent* dibekali ilmu tentang bagaimana menjadi seorang mentor yang efektif dan *talent* yang menginspirasi. Selain dari praktisi, pemateri lainnya yaitu dari bagian kepegawaian Sekretariat Badan selaku pengelola manajemen talenta BPPK yang memaparkan tentang pelaksanaan pengembangan talent BPPK.

PELATIHAN KOMPETENSI TEKNIS DAN MANAJERIAL INTI (E-LEARNING)

Setelah persiapan mentor dan *talent* dilaksanakan, pada tahap kedua para *talent* dihadapkan dengan Pelatihan Kompetensi Teknis dan Manajerial Inti yang diselenggarakan secara *fully e-learning*. Pelatihan ini diperuntukkan bagi *talent* level *basic* maupun *intermediate*. Dalam pelatihan ini para *talent* dibekali pengetahuan, sikap dan keterampilan terkait kompetensi teknis dasar yang

meliputi perpajakan, kepabeanaan dan cukai, anggaran, kekayaan negara, perimbangan keuangan dan umum serta kompetensi manajerial inti berdasarkan kamus kompetensi Kementerian Keuangan (PMK 219 Tahun 2017) yang diperlukan untuk menduduki jabatan eselon III dan IV.

Dalam penyusunan materi kompetensi teknis, Pusdiklat PSDM bekerja sama dengan Pusdiklat teknis lainnya seperti Pusdiklat Keuangan Umum, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Pusdiklat Bea dan Cukai, Pusdiklat Pajak dan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Sedangkan Kompetensi Manajerial Inti yang terdiri atas materi *Integrity, Drive for Result, Teamwork and Collaboration, Stakeholders Orientation*, dan *Quality Improvement* disusun oleh Pusdiklat PSDM.

WORKSHOP KOMPETENSI MANAJERIAL (PROFESIONAL) DAN SOSIO KULTURAL

Tahap selanjutnya dalam rangkaian kegiatan *Talent Development Program* BPPK adalah *Workshop* Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural yang diselenggarakan secara klasikal. *Workshop* ini dilaksanakan selama dua hari ini dengan pemisahan antara level *basic* dan level *intermediate*. Sama seperti tahap kedua, *Workshop* Kompetensi Manajerial (Profesional) dan Sosio Kultural pada level *basic* maupun level *intermediate* juga merujuk pada kamus kompetensi Kementerian Keuangan (PMK 219 Tahun 2017) dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada para *talent* terkait kompetensi manajerial profesional dan kompetensi sosio-kultural.

Pada level *basic*, para *talent* diberikan beberapa materi, antara lain :

1. *empowering others*, ditujukan agar para *talent* mampu mengembangkan dan membimbing bawahan atau pihak lain yang terkait guna meningkatkan kompetensi individual dan mendorong tumbuhnya proses pembelajaran yang berkesinambungan;

2. *planning and organizing*, ditujukan agar para *talent* mampu menyusun rencana kerja dengan target yang spesifik, realistis, terukur, dengan target waktu penyelesaian yang selaras dengan visi organisasi, termasuk proses pengelolaan sumber daya yang terlibat didalamnya;
3. *innovation*, ditujukan agar para *talent* mampu menciptakan, mengembangkan dan mengimplementasikan paradigma, wawasan dan cara pandang baru terhadap beragam pendekatan, sehingga dapat memberikan hasil yang efisien serta efektif dalam lingkup organisasi;
4. *komunikasi dalam keberagaman*, ditujukan agar para *talent* mampu membangun komunikasi efektif dalam tim yang dipimpin yang didominasi oleh berbagai karakter dan latar belakang yang beragam.

Sementara pada level *intermediate*, para *talent* diberikan beberapa materi antara lain :

1. *leadership*, ditujukan agar para *talent* mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai macam peran dan gaya kepemimpinan secara fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi dalam rangka mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan organisasi dengan menerapkan nilai-nilai organisasi secara konsisten;
2. *empowering others*, ditujukan agar para *talent* mampu mengembangkan dan membimbing bawahan atau pihak lain yang terkait guna meningkatkan kompetensi individual dan mendorong tumbuhnya proses pembelajaran yang berkesinambungan;
3. *problem solving analysis*, ditujukan agar para *talent* mampu mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menganalisa masalah, serta mengembangkan alternatif solusi praktis dan strategis;
4. *planning and organizing*, ditujukan agar para *talent* mampu menyusun rencana

kerja dengan target yang spesifik, realistis, terukur, dengan target waktu penyelesaian yang selaras dengan visi organisasi, termasuk proses pengelolaan sumber daya yang terlibat didalamnya;

5. komunikasi dalam keberagaman, ditujukan agar para *talent* mampu mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu/kelompok masyarakat dan mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia.

IMPLEMENTASI INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN (IDP)

Setelah menyelesaikan berbagai pelatihan dan *workshop* dalam *Talent Development Program* BPPK, pada tahap keempat, para *talent* diminta untuk mengisi formulir *Individual Development Plan* (IDP) dan mengimplementasikannya ke dalam beberapa kegiatan pengembangan *talent* antara lain *project assignment*, *job shadowing* dan kegiatan ekstrakurikuler. Pada level *basic*, kegiatan *project assignment* berupa memimpin tim dalam menyelesaikan satu buah *project* Pusdiklat/Balai Diklat level eselon IV. Sedangkan pada level *intermediate*, *talent* memimpin tim dalam menyelesaikan satu buah *project* Pusdiklat/Balai Diklat level eselon III.

Talent Development Program BPPK merupakan kegiatan yang ditujukan untuk para pegawai dan pejabat di lingkungan BPPK yang diproyeksikan menduduki jabatan lebih tinggi dari posisinya saat ini.

Kegiatan pengembangan *talent* kedua dalam IDP berupa *job shadowing*. Pada level *basic*, *talent* melaksanakan penugasan/kegiatan terkait jabatan eselon 4 dengan didampingi oleh pejabat eselon 4 selaku mentor. Begitu pun dengan kegiatan *job shadowing* pada level *intermedite*, *talent* melaksanakan penugasan/kegiatan terkait jabatan eselon 3 dengan didampingi oleh pejabat eselon 3 selaku mentor.

Kegiatan pengembangan *talent* yang terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler. Ada dua pilihan dalam kegiatan ini yaitu kegiatan ekstrakurikuler memimpin tim atau *mereview* buku/jurnal. Dalam level *basic*, kegiatan ekstrakurikuler memimpin tim dapat dilakukan dengan mengkoordinir kegiatan ekstrakurikuler (misalnya: kegiatan olahraga/keagamaan/hari besar) pada level Pusdiklat/Balai Diklat, sedangkan *talent* level *intermediate* dapat mengkoordinasi kegiatan ekstrakurikuler pada level BPPK. Untuk ketentuan *mereview* buku pada level *basic* maupun *intermediate* sama-sama maksimal lima halaman pada bagian isi.

EVALUASI IMPLEMENTASI *INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN*

Tahap terakhir dalam *Talent Development Program* BPPK ialah Evaluasi Implementasi *Individual Development Plan*. Selama proses pelaksanaan *Individual Development Plan* (IDP) para *talent* akan dinilai dengan beberapa indikator penilaian berdasarkan KMK 1227 Tahun 2016. Penilaian kegiatan *project assignment*, *job shadowing* dan kegiatan ekstrakurikuler memimpin tim dilakukan oleh mentor, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler berupa *me-review* buku/jurnal dilakukan oleh widyaiswara Pusdiklat PSDM.

Penilaian keseluruhan rangkaian program *Talent Development* BPPK dibagi ke dalam beberapa porsi. Kegiatan evaluasi *e-learning* mendapatkan porsi 10%, evaluasi tatap muka Kompetensi Manajerial (Profesional) dan Sosio Kultural sebesar 10%, evaluasi IDP berupa *project assignment* sebesar 30%, *job shadowing* 30% dan kegiatan ekstrakurikuler sebesar 10%.



FOTO :
ANDITA TRIAS NUR AZIZAH



PROFIL

PEGAWAI PELAKSANA TELADAN BPPK 2019

ARIMBI PUTRI

NOVAN HERDIYANTO: BEKERJA TULUS, “REWARD” ADALAH BONUS

FOTO :
DOK. PRIBADI

Berusaha bekerja sebaik mungkin, maka penghargaan akan mengikuti sesuai dengan hasil kerja tersebut. Prinsip itu lah yang barangkali justru mengantarkan Novan Herdiyanto menjadi salah satu Pegawai Teladan BPPK 2019. Tak mengharapkan pamrih, Novan yang sudah lebih dari satu dekade menapaki karir di BPPK ini berupaya terus meningkatkan kemampuan diri dan memberikan yang terbaik untuk instansi.

Tak heran, jika nama Novan terukir nomor wahid pada PENG-3/PP.1/2019 tentang Pegawai Pelaksana Teladan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 2019. Berkat gelar yang diraihinya tersebut, Novan juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati yang memberikan penghargaan secara khusus kepada para pegawai teladan di lingkungan Kementerian Keuangan, akhir Oktober lalu.

“Nggak nyangka sih, sekaligus senang dan bangga. Karena baru dikasih taunya malam sebelum upacara Hari Oeang itu untuk sekaligus menerima penghargaan,” ungkap laki-laki asal Kediri, Jawa Timur, tersebut. Novan yang sehari-

harinya bergiat di Kota Malang ini akhirnya langsung bertolak ke Jakarta usai menerima kabar akan menerima penghargaan langsung dari Bu Menteri Keuangan.

Dia pun menuturkan, tidak menyangka bisa menyabet gelar tersebut karena layaknya pegawai pada umumnya, Novan mengawali karirnya dari seorang alumnus STAN dan menurutnya tidak ada hal yang istimewa selama menempuh pendidikan tersebut. Hanya saja, semangat belajar dan rasa tanggung jawabnya yang tinggi menuntun dirinya pada ilmu-ilmu baru yang terus membentuknya hingga menjadi pribadi yang sekarang ini.

“Dulu waktu di Unit Layanan Pengadaan (ULP) BPPK sering dapat pengetahuan-pengetahuan baru, seperti pengadaan barang itu menambah pengetahuan kami. Misalnya beli UPS, spesifikasinya seperti apa, cara ngecek surat dukungannya, atau dari distributornya gimana. Kita harus tau dulu barang itu gimana, bisa dari internet, dari mana-mana. Sebelum maju ke distributor kan kita harus punya bekal pengetahuan dulu,” terangnya.

Setelah ditempatkan di Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal Balai Diklat Keuangan Malang, Novan pun tetap tak henti mengembangkan diri dan mencari ilmu. Novan yang berkulat pada keuangan dan pengadaan ini pun kerap *sit in* dalam sejumlah pelatihan yang diselenggarakan di BDK Malang. Hal ini ia lakukan agar selalu *up-to-date* dengan peraturan-peraturan terbaru. Di sisi lain, dalam beberapa kesempatan Novan juga menjadi salah satu pengajar pelatihan, terutama yang berkaitan dengan aplikasi keuangan.

Hingga kini memasuki tahun kedua belas masa baktinya, Novan dapat dikatakan telah malang melintang di bidang pengadaan barang dan jasa. Segala manis dan pahit telah ia rasakan, termasuk berhadapan dengan salah satu bentuk gratifikasi. “Waktu mau lebaran PIC salah satu penyedia jasa yang bekerja sama dengan Balai Diklat Keuangan Malang mau mengirimkan parcel. Langsung saya

tolak secara halus, saya informasikan tentang surat edaran larangan menerima parcel dalam hari raya keagamaan. Selanjutnya saya laporkan ke unit Kepatuhan Internal dan atasan langsung,” ujar dia.

Kejujuran dan kedisiplinan yang dimiliki Novan ini tidak lepas dari ajaran kedua orangtuanya yang menanamkan nilai-nilai tersebut sejak ia kecil. Keluarganya pun dapat dikatakan cukup demokratis dengan memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya namun disertai dengan tanggung jawab yang tinggi.

Salah satunya adalah kedua orangtua Novan tidak pernah memaksakan anak-anaknya untuk belajar. Mereka belajar atas kemauan dan tanggung jawab yang diembannya. Hingga kini, nilai-nilai tersebut pun senantiasa terbawa dalam kehidupan bekerja dan kesehariannya. Sulung dari dua bersaudara ini kerap menyusun skala prioritas dalam pekerjaannya sehingga diperoleh ritme pekerjaan yang sistematis dan terstruktur. Hal ini pula yang diakui Novan menjadi salah satu kiat meningkatkan performa kerjanya.

Rupanya tak hanya terkait pekerjaan, Novan yang menggemari fotografi ini juga mendapatkan berkah dari jepretan-jepretannya. Pecinta bakso Malang ini menjadi salah satu dari 25 orang yang diundang Ibu Negara ke-6 Indonesia, almh. Ani Yudhoyono, ke Istana Bogor pada tahun 2013 lalu. Novan diajak berkeliling Istana Bogor untuk berburu foto, yang kemudian dipresentasikan di hadapan istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Kegemarannya ini pun didukung dengan keikutsertaannya dalam pelatihan luar badan fotografi di Darwis Triadi School of Photography. Novan juga rutin mendaftarkan diri sebagai relawan dokumentasi pada Kemenkeu Mengajar. Tak tanggung, mulai dari Kemenkeu Mengajar 1, 2, dan 4, dirinya tercatat sebagai tim dokumentasi. Dalam pekerjaan sehari-harinya pun, Novan didapuk sebagai tim Kemenkeu Learning

Center (KLC) untuk pembuatan video *knowledge capture*.

Novan menyadari, apa pun yang dikerjakan seluruhnya akan kembali kepada diri sendiri, dan sebagai kepala keluarga dirinya merupakan contoh bagi keluarga kecilnya. “Prinsip yang saya pegang sampai sekarang ya terutama sifat-sifat nabi terkait kejujuran, amanah, dan lain-lain. Karena pribadi di keluarga jadi panutan di keluarga juga,” pungkas ayah satu anak itu. Pada akhirnya, baik bekerja dan berkeluarga selalu dipertanggungjawabkan dan berujung kepada Sang Maha Pencipta.

Sulung dari dua bersaudara ini kerap menyusun skala prioritas dalam pekerjaannya sehingga diperoleh ritme pekerjaan yang sistematis dan terstruktur. Hal ini pula yang diakui Novan menjadi salah satu kiat meningkatkan performa kerjanya.

DODI SEPTARIZA

MOHAMMAD IQBAL: TAK PERLU TAKUT SURUT MENTARI AKAN MENYAMBUT

Delapan tahun bertugas di Punawarman, membuat Iqbal lekat dengan sebutan “orang” Sekretariat Badan. Namun ternyata sudah empat tahun dirinya menyeberang dari Pulau Jawa menuju Kalimantan untuk bertugas di Balai Diklat Keuangan Pontianak. Menarik melihat perjalanan hidup salah seorang pegawai pelaksana teladan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tahun 2019 ini, mulai dari masa kecil, pasang surut di dunia kerja hingga petualangannya di Bumi Borneo.

MASA KECIL, REMAJA, DAN AWAL KARIR

Dari intonasi dan cara bicara saja sangat mudah ditebak bahwa seorang Mohammad Iqbal adalah jejak asli Parahyangan, Jawa Barat. Logat khas Sunda begitu kental keluar dari tutur katanya. Iqbal, begitu ia akrab disapa memang lahir dan besar di kota yang terkenal dengan makanan tahu gorengnya yaitu Sumedang, Jawa Barat. “Saya lahir dan besar di sebuah kota kecil namun asri, hidup bersama empat saudara kandung di tengah-tengah keluarga besar, bersama saudara dan sepupu-sepupu yang ramai itu cukup berisik, namun sangat



FOTO :
DOK. PRIBADI

menyenangkan, cerita Iqbal mengenang masa kecilnya.

Berenjak remaja, Iqbal dikenal sebagai sosok yang aktif dan berprestasi. Selain dalam bidang akademik di mana dirinya berhasil juara kelas, ia juga aktif dalam berbagai organisasi sekolah seperti Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) dan OSIS. Berbagai lomba dan kejuaraan juga diikuti oleh Iqbal, salah satu yang paling berkesan adalah ketika dirinya ikut pada lomba debat tingkat nasional. Ingatannya pun melayang pada peristiwa Kompetisi Debat Politik tahun 2004 di Depok, “Saat lomba, saya bisa jalan-jalan ke Universitas Indonesia dan dikarantina, di sana saya bertemu dengan teman teman dari seluruh Indonesia dan berinteraksi dengan mereka,” kenang Iqbal.

Sebagai murid berprestasi tidak sulit bagi Iqbal melanjutkan untuk pendidikan di kampus idamannya STAN, dimana Iqbal berhasil lulus di D1 STAN, BDK Cimahi. Setelah setahun masa kuliah dilalui dengan mulus sampai akhirnya dirinya lulus untuk kemudian ditempatkan dan bekerja di Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Bagian Kepegawaian.

Jika diumpamakan, perjalanan karir Iqbal layaknya sebuah *roller coaster* yang penuh lika-liku dan naik turun. Sempat mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di D3 Khusus STAN, Iqbal justru tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya. Namun hal tersebut tidak lantas membuat Iqbal patah arang, dirinya tetap semangat untuk melanjutkan pendidikan, di mana saat ini ia sedang menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum di Universitas Terbuka, untuk melanjutkan mimpinya dulu yang sempat kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. Karena dengan berpegang moto hidupnya “Jangan takut di saat malam paling gelap dan kelam, karena sebentar lagi cahaya mentari kan bersinar”, Iqbal yakin dengan kerja keras tanpa kenal lelah, kegagalan hanyalah sebuah kesuksesan yang tertunda.

PETUALANGAN BARU DI BORNEO

Tahun 2015 Iqbal menerima sebuah kejutan yang tidak pernah ia sangka-sangka sebelumnya. Sebuah Surat Keputusan Mutasi membuatnya harus berpindah tugas dari Kantor Pusat menuju Balai Diklat Keuangan Pontianak. Walaupun awalnya sempat kesulitan, Iqbal mencoba terus beradaptasi dengan budaya dan ritme kerja di tempat kerja barunya itu.

Berjauhan dengan keluarga di Pulau Jawa, membuat Iqbal melakukan banyak hal untuk mengisi waktu luang, salah satunya adalah dengan mulai belajar menjadi seorang videografer. Diawali dengan keisengannya membuat video-video untuk koleksi pribadi, ternyata Iqbal mulai jatuh hati dengan hobi barunya ini. Dirinya terus belajar dan menekuni dunia videografi, hingga saat ini mulai dikenal sebagai salah satu videografer andal di kantor Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Barat. Hal itu ditunjukkan dengan partisipasinya pada kegiatan Kemenkeu mengajar 3 sebagai *videographer* yang men-*direct official video* Kemenkeu Mengajar wilayah Kalbar, dan menjadi Koordinator Dokumentator yang beranggotakan 17 orang dari lintas unit Kemenkeu pada Kemenkeu Mengajar 4 tahun 2019.

Seiring dengan transformasi *digital* di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, karya-karya Iqbal mulai diakui secara luas. Dirinya banyak terlibat dalam produksi berbagai konten video edukasi BDK Pontianak yang diunggah pada portal pembelajaran *Kemenkeu Learning Center* (KLC) ataupun media sosial lain. Berkat karya dan juga dedikasinya tersebut, oleh kantornya Iqbal kemudian diusulkan untuk menjadi calon pegawai pelaksana teladan BPPK 2019.

Dirinya menceritakan bahwa proses pemilihan pegawai teladan BDK Pontianak dilakukan melalui mekanisme *voting*. “Pemilihannya sendiri dilakukan dalam tiga putaran, dari awalnya enam

kandidat mengerucut menjadi dua orang, hingga akhirnya saya terpilih untuk mewakili BDK Pontianak sebagai calon pegawai teladan. Sejujurnya saya terkejut dan tidak menyangka bahwa saya yang terpilih menjadi wakil”, kenang Iqbal.

Selanjutnya pada proses di tingkat nasional, Iqbal akhirnya berhasil terpilih menjadi Pegawai Pelaksana Teladan BPPK 2019 bersama dua orang pegawai lainnya. Tentu, penghargaan ini merupakan sesuatu yang patut dibanggakan oleh Iqbal. Hal ini membuktikan di mana pun dirinya bertugas, ia akan terus memberikan yang terbaik. Walaupun dinamika kehidupan dan karirnya penuh dengan pasang surut, Iqbal akan terus berusaha dan pantang menyerah, karena baginya hidup adalah tentang berjuang. Perjuangan tanpa kenal lelah dan tiada henti.

Diawali dengan keisengannya membuat video-video untuk koleksi pribadi, ternyata Iqbal mulai jatuh hati dengan hobi barunya ini. Dirinya terus belajar dan menekuni dunia videografi, hingga saat ini mulai dikenal sebagai salah satu videografer andal di kantor Kementerian Keuangan di wilayah Kalimantan Barat.

ARIMBI PUTRI

FAKHRUDIN: DARI PIC BMN KE PIC KLC, TERUS BELAJAR TANPA HENTI



FOTO :
SENO ADI NUGROHO

Aksen Sumatera Selatan masih kental dalam setiap tutur katanya. Di balik kesantunan dan kerendahan hatinya, terdapat sosok yang teguh dan visioner di dalamnya. Dia adalah Fakhruddin, pelaksana Subbidang Kurikulum Pusdiklat Keuangan Umum yang juga peraih predikat Pegawai Teladan BPPK 2019. Nama Fakhruddin bersanding dengan dua pegawai terpilih lain yang mampu menjadi inspirasi bagi para insan BPPK.

Bukan tanpa alasan predikat tersebut berhasil ditorehkan pegawai kelahiran Palembang, 7 September 1991 itu. Etos kerjanya yang tinggi dan keinginannya untuk terus belajar, membuat laki-laki yang akrab disapa Udin ini diajukan menjadi calon Pegawai Teladan BPPK 2019 oleh kedua atasannya. Rutinitas pekerjaan sehari-harinya yang berkesinambungan dengan desain pembelajaran dan teknologi, membuat pejabat di unitnya melirik Udin sebagai bakal calon yang potensial.

“Atasan saya terutama Pak Pandu bilang, ini eranya *e-learning*, dan kebetulan yang banyak berkesinambungan dengan itu saya. Beberapa (*e-learning*) yang kita luncurkan pun sudah dikerjakan oleh seluruh pegawai

BPPK,” ujar Udin saat ditemui di Pusdiklat Keuangan Umum, Pancoran, Jakarta Selatan.

Ketika namanya berhasil keluar pada pengumuman Pegawai Teladan BPPK 2019, rasa terkejut, senang, namun juga berat bercampur aduk menjadi satu. Ayah satu orang putri ini merasa predikat ‘teladan’ tidak semudah yang orang pikirkan. Bagi dia, teladan itu tidak hanya dilihat dari segi pekerjaan, tetapi secara keseluruhan. Udin beranggapan, masih banyak yang harus ditingkatkan dari dirinya.

Untuk itu, Udin memiliki prinsip yang teguh untuk selalu belajar dalam setiap langkahnya. Hal yang sejalan dan mencerminkan semangat BPPK. Salah satu pelajaran yang paling banyak ia dapatkan yakni ketika baru menapaki karir di Subbidang Kurikulum. Tiga tahun lebih berada di Subbidang Rumah Tangga sebagai *Person in Charge* Barang Milik Negara (PIC BMN), Udin dihadapkan pada tantangan di mana dia harus benar-benar berkesinambungan di bidang pembelajaran.

Sesuai dengan prinsip *Corporate University* yang diusung Kementerian Keuangan, Udin pun aktif mempelajari cara-cara membuat desain pembelajaran secara mandiri dan terutama belajar dari pengalamannya bekerja dan bimbingan rekan-rekan kerjanya. “Banyak hal-hal baru, pengalaman baru, berkat bimbingan dari atasan, dan rekan-rekan senior di Subbid Kurikulum dan Renbang, belajar banyak terutama pengembangan desain pembelajaran,” tuturnya.

Berkat ketekunannya untuk terus belajar, kerja sama, serta kerja keras dari seluruh tim Subbidang Kurikulum, pembuatan bahan ajar multimedia yang awalnya mengandalkan rekanan, sedikit demi sedikit mulai bisa dikerjakan secara mandiri. Hal tersebut juga tidak lepas dari peran atasannya yang selalu mendukung para pegawainya untuk berinovasi.

Hasil *e-learning* pertama dari kekuatan swadaya ini adalah *e-learning* Tata Naskah Dinas (TND) dan *Microlearning*

Kemenkeu *Corporate University*. Udin pun didapuk sebagai administrator yang mengelola KLC di subbidangnya. Udin yang sebelumnya pernah aktif menulis blog ini pun sudah cukup familiar dengan *platform* KLC yang juga tidak jauh berbeda dengan fitur blog. Meski demikian, Udin mengaku pantang untuk berhenti belajar.

“Jangan berhenti mencari ilmu-ilmu yang baru, yang tadinya kita nggak bisa, karena penting di pekerjaan kita. Apalagi sekarang di era teknologi informasi, banyak sekali informasi di luar sana. Intinya jangan berhenti belajar, banyak informasi di luar yang bisa kita serap,” pesannya.

Ke depannya, penggemar kuliner pempek ini ingin membuat sistem pembelajaran yang linier dengan pembelajaran klasikal. Jika pembelajaran dalam kelas terdapat nilai aktivitas, nilai kehadiran, dan nilai ujian, Udin berpendapat jika komponen pada *e-learning* pun harus sama seperti pembelajaran dalam kelas tersebut. Sebab, BPPK memiliki peranan penting dalam pembentukan *learning ecosystem* di Kemenkeu.

“Saya melihat BPPK ini jadi tulang punggungnya Kementerian Keuangan. Karena seharusnya dengan belajar di BPPK, pegawai Kementerian Keuangan itu kinerjanya menjadi lebih baik, sehingga semua materi pembelajaran bisa menunjang pekerjaannya,” ujar dia.

Selain memegang teguh prinsip untuk selalu belajar, Udin juga sangat memegang teguh prinsip kesederhanaan dan keagamaan yang dianutnya. Udin lahir dan besar di sebuah keluarga pedagang yang setiap harinya berjuang mencari nafkah, bangun pukul tiga pagi untuk berbelanja bahan baku dagangan. Oleh karena itu, Udin tak pernah gentar menyuarakan kebaikan, bahkan ketika dirinya ditawari bentuk gratifikasi saat masih menjabat PIC BMN.

“Pegawai baru dikasih seperti itu ya, lumayan nilainya saat itu. Tapi ya saya tau kalo itu tidak baik jadi saya tolak secara halus, untung mereka paham. Kita

tahu hal seperti itu tidak baik, baik secara peraturan maupun agama,”

“Yang selalu saya ingat adalah jangan lelah untuk berbuat baik. Karena lelah bisa hilang, tapi perbuatan baik itu yang akan kekal di dunia dan di akhirat. Saya terus berusaha meskipun belum sempurna,” tutupnya.

Berkat ketekunannya untuk terus belajar, kerja sama, serta kerja keras dari seluruh tim Subbidang Kurikulum, pembuatan bahan ajar multimedia yang awalnya mengandalkan rekanan, sedikit demi sedikit mulai bisa dikerjakan secara mandiri.

Serambi Ilmu

Bambang Sancoko

PERUBAHAN PERAN
PPHP DALAM PBJ PASCA
PERPRES 16/2018

Bagus Rosyid

PANGKAS KESENJANGAN
SOSIAL DENGAN
PROGRAM PEMBIAYAAN
UMI

I Wayan Sukada

EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN
EKSTENSIFIKASI
TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK

BAMBANG SANCOKO
WIDYAISWARA PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

PERUBAHAN PERAN PPHP DALAM PBJ PASCA PERPRES 16/2018

ABSTRAK

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, banyak perubahan pengaturan dalam pengadaan barang/jasa. Salah satu perubahannya adalah perubahan peran Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam proses pengadaan barang/jasa. PPHP hanya memeriksa aspek administrasi hasil pekerjaan saja. Cukup banyak dampak dari perubahan pengaturan mengenai PPHP, sehingga harus diantisipasi oleh satker yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Kata Kunci: PPHP, PBJ, hasil pekerjaan, serah terima.

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, telah terbit untuk menggantikan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Banyak perubahan pengaturan dalam pengadaan barang/jasa. Perubahan ini untuk mengatur kekurangan dan perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas pengadaan barang/jasa yang baik.

Salah satu perubahan dalam Perpres yang baru adalah perubahan peran Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam proses pengadaan barang/jasa. Pada Perpres sebelumnya, PPHP terlibat dalam proses serah terima barang/jasa. Sedangkan pada Perpres No. 16 Tahun 2018, PPHP tidak terlibat dalam proses serah terima barang/jasa.

PPHP dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 memiliki peran setelah proses serah terima barang/jasa dari penyedia ke PPK selesai. PPHP hanya memeriksa aspek administrasi hasil pekerjaan saja. Dampak dari perubahan pengaturan mengenai

PPHP banyak sehingga harus diantisipasi oleh satker yang melaksanakan pengadaan barang/jasa. Pada tulisan ini akan diuraikan secara jelas perubahan-perubahan dalam pengaturan mengenai PPHP dan dampak yang harus diantisipasi oleh satker.

PERUBAHAN NOMENKLATUR PPHP

Pertama kita lihat terlebih dahulu perubahan nomenklatur PPHP. Istilah PPHP mengalami perubahan nomenklatur dalam Perpres yang baru. Sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, PPHP merupakan istilah untuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam peraturan lama didefinisikan sebagai panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, dikenalkan dua istilah yaitu Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang disingkat PjPHP dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

(PjPHP) adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

PERUBAHAN TUGAS PPHP

Melihat perubahan nomenklatur tersebut, dampaknya terjadi perubahan substansi tugas yang diemban PPHP. Sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, PPHP mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Sedangkan dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, PjPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00. Sedangkan PPHP memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00.

Disini kita dapat melihat bahwa di ketentuan lama PPHP memeriksa langsung hasil pekerjaan dari penyedia dan selanjutnya membuat serta menandatangani BAST hasil pekerjaan. Jadi aspek substantif/teknis dalam serah terima hasil pekerjaan juga merupakan tanggung jawab PPHP.

Hal ini berbeda dengan ketentuan di Perpres yang baru, dimana aspek substantif/teknis serah terima hasil pekerjaan tidak lagi menjadi tanggung jawab PjPHP/PPHP. PjPHP/PPHP hanya bertanggung jawab pada aspek administrasi serah terima hasil pekerjaan. Tanggung jawab administrasi ini pun hanya pada saat setelah proses serah terima dan pembayaran kepada penyedia

selesai. Proses pemeriksaan administrasi disini untuk memastikan kelengkapan administrasi dalam rangka pencatatan barang/jasa yang dihasilkan.

PROSES SERAH TERIMA BARANG/JASA VERSI LAMA

Terkait perubahan substansi tugas PPHP kita dapat melihat lebih jelas melalui proses serah terima hasil pekerjaannya. Proses serah terima hasil pekerjaan pada ketentuan lama dapat dilihat pada Gambar 1.

Pada Gambar 1, proses serah terima hasil pekerjaan dimulai dari setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. Selanjutnya PA/KPA menunjuk PPHP untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan PPHP melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak. PPHP menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

Seiring dengan berjalannya waktu, Perpres No. 54 Tahun 2010 mengalami beberapa perubahan. Pada perubahan kedua (Perpres No. 70 Tahun 2012), rincian proses pengadaan barang/jasa tidak diatur dalam Perpres tetapi diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam Peraturan Kepala LKPP No. 12 Tahun 2012, proses serah terima barang/jasa diatur masing-masing sesuai dengan jenis pengadaan. Proses serah terima barang dimulai setelah pekerjaan 100%, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan. Selanjutnya dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan PPHP. PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia. Apabila terdapat kekurangan/kekurangan dan/ atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:

1. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
2. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan).

Untuk proses serah terima barang/jasa terkait pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi diatur sendiri pada bagian yang berbeda tetapi pada prinsipnya sama dengan pengadaan barang.

SERAH TERIMA BARANG/JASA VERSI BARU

Proses serah terima barang/jasa pada ketentuan baru tidak diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, tetapi diatur dalam Peraturan LKPP No. Tahun 2018. Dalam Perka ini serah terima hasil pekerjaan secara umum dapat dilihat pada Gambar 2.

Berbeda dengan proses sebelumnya, pada ketentuan baru sebagaimana Gambar 2 serah terima dimulai setelah pekerjaan selesai 100% sesuai Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/ atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat

Gambar 1
Proses Serah Terima Hasil Pekerjaan versi Perpres 54/2010



Sumber : Perpres 54 Tahun 2010

Gambar 2
Proses Serah Terima Hasil Pekerjaan versi Perpres 16/2018



Sumber : PerLKPP 9/2018

Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima. Setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA. PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/hasil pekerjaan yang diserahkan.

PjPHP/PPHP melakukan pemeriksaan administratif proses pengadaan barang/ jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, meliputi dokumen program/ penganggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/ SIRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan Penyedia, dokumen Kontrak dan perubahannya serta pengendaliannya, dan dokumen serah terima hasil pekerjaan. Apabila hasil pemeriksaan administrasi ditemukan ketidaksesuaian/kekurangan, PjPHP/ PPHP melalui PA/KPA memerintahkan Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan dokumen administratif. Hasil pemeriksaan administratif dituangkan dalam Berita Acara.

SIMPULAN

Dari uraian di atas kita dapat menyimpulkan adanya beberapa perubahan terhadap keberadaan PPHP. Pertama, terjadi perubahan nomenklatur PPHP. Perubahan nomenklatur dari sebelumnya PPHP merupakan singkatan dari Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. menjadi dua istilah yaitu Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP.

Perubahan berikutnya pada substansi tugas yang diemban oleh PPHP. PPHP sebelumnya memiliki tugas ikut dalam proses serah terima barang/jasa. Pada proses ini, PPHP juga bertanggung jawab atas aspek substantif/teknis. Sedangkan pada ketentuan baru, PjPHP/PPHP hanya bertugas untuk memeriksa hasil pekerjaan. Tugas ini dilaksanakan setelah PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Dengan adanya perubahan definisi dan tugas PPHP tersebut maka, PPHP sekarang tidak berhak lagi memeriksa barang/hasil pekerjaan secara teknis. PPHP yang sekarang menjadi PjPHP/ PPHP hanya berhak memeriksa administrasi barang/hasil pekerjaan saja.

REFERENSI

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAGUS ROSYID
PEGAWAI BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN

PANGKAS KESENJANGAN SOSIAL DENGAN PROGRAM PEMBIAYAAN UMI

ABSTRAK

Untuk memperpendek gap antara si miskin dan si kaya, pada tahun 2017 pemerintah menggagas sebuah program pembiayaan untuk masyarakat kecil yang belum tersentuh oleh dunia perbankan. Program ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) adalah program lanjutan dari program bantuan sosial yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah agar bisa berusaha mandiri. Sasaran program ini yaitu usaha mikro yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Kata kunci : pembiayaan ultra mikro, usaha mikro, kredit usaha rakyat

PENDAHULUAN

Pemerintah saat ini mempunyai dua program bantuan sosial (bansos) kemasyarakatan yang berbentuk stimulus dan pemberdayaan. Dua bentuk ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda.

Stimulus diberikan sebagai upaya pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin dari risiko ekonomi. Sedangkan pemberdayaan berupa bantuan permodalan diberikan pada masyarakat miskin agar bisa mandiri dengan pendampingan konsultasi.

Bansos yang bersifat stimulus misalnya Program Indonesia Pintar, Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai.

Sedangkan bansos yang bersifat pemberdayaan misalnya program *e-Waroeng* yang dijalankan oleh Kementerian Sosial RI, program Kredit

Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan oleh perbankan di bawah koordinasi Kantor Menteri Koordinator Perekonomian RI, dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan RI.

Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal, Ir. Syahrir Ika, mengatakan bahwa ada hal-hal yang membedakan antara ketiga model bansos pemberdayaan di atas, salah satunya yaitu segmentasi pasar.

“E-Waroeng dikhususkan bagi rumah tangga miskin yang tidak memiliki usaha ekonomi. UMi segmennya di atas rumah tangga penerima bansos yang mulai melakukan usaha secara ekonomi (feasible) tapi kesulitan mendapatkan akses pemodalannya dari lembaga keuangan non bank. Contohnya ya penjual rokok, rumah makan kecil-kecilan, para pedagang di pasar-pasar rakyat, nelayan-nelayan skala kecil, petani, dan lainnya,” kata Syahrir yang juga pernah menjabat Direktur PIP Kemenkeu ini.

“Nah kalau KUR, sasarannya masyarakat/UMKM yang memenuhi syarat bank atau

koperasi. KUR biasanya butuh modal di atas Rp10 juta hingga Rp500 juta, sedangkan pembiayaan UMi maksimal Rp10 juta,” lanjutnya.

PEMBAHASAN

1. Mimpi Memangkas Kesenjangan Sosial

Badan Pusat Statistik RI (BPS) pada tahun 2018 melaporkan terdapat sekitar 44 juta rumah tangga miskin yang masuk dalam kategori fakir dan miskin. Dengan keadaan tersebut, mereka tidak mampu mengakses dana KUR karena dianggap tidak *bankable*.

Selain kemiskinan, kesenjangan sosial di Indonesia juga ternyata cukup tinggi. BPS mencatat indeks gini (gini ratio) Indonesia masih di level 0,39. Artinya apa? Kesejahteraan belum merata, masih ada gap antara si kaya dan si miskin. Hal ini juga berarti pertumbuhan ekonomi belum berkualitas meski tiap tahunnya mencapai sekitar 5 persen.

Oleh karena itu, pemerintah mencari formulasi yang tepat untuk merangkul masyarakat yang bergerak di atas segmen bansos namun tidak bisa mengakses dana KUR. Pada tahun 2017, pemerintah menemukan racikan program efektif untuk memberdayakan masyarakat miskin yang ingin berwirausaha namun kesulitan dana perankan. Program itu dinamakan pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

“Awalnya ada audit Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah tahun 2016, salah satu temuannya adalah sasaran KUR tidak bisa diyakini. BPK meminta pemerintah untuk memastikan apakah KUR benar-benar tepat sasaran? Kenapa masyarakat miskin yang tidak punya jaminan aset tidak bisa mengakses dana perbankan?” ungkap pria yang juga Ketua Himpunan Peneliti Indonesia itu.

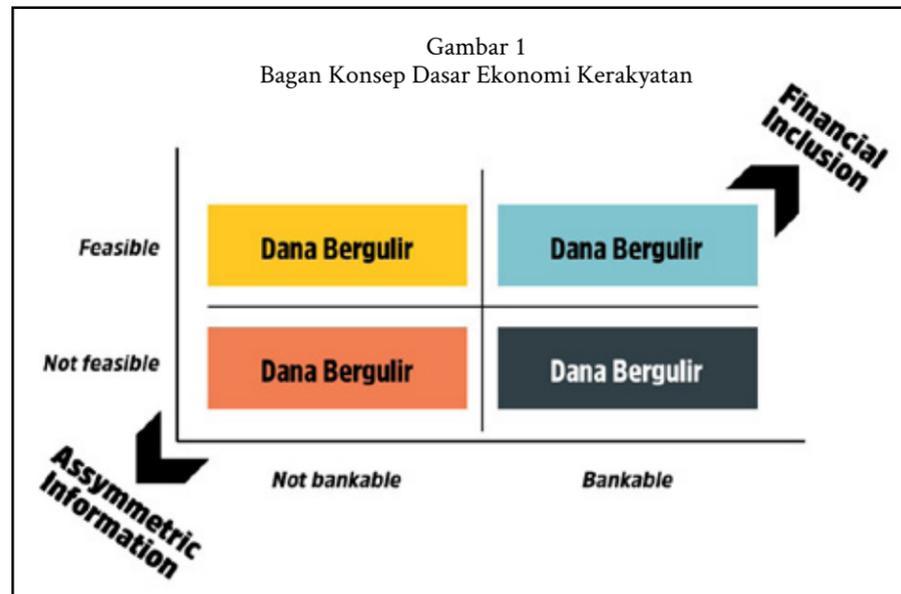
“Untuk itulah UMi lahir sebagai jawaban pemodal kepada masyarakat miskin yang akses dana KUR-nya ditolak bank. Ibaratnya, orang-orang kecil itu biar berwirausaha dan mandiri. Tidak menggantungkan bansos pemerintah terus. Barangkali nanti usahanya maju sehingga punya aset untuk meminjam dana KUR di bank,” tambahnya.

Syahrir Ika Menjelaskan Awal Mula Pembiayaan UMi (dok. Pribadi)

2. Mengenal Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Dasar hukum yang menjadi payung Pembiayaan UMi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. PIP sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan RI, ditugaskan sebagai Koordinator dana (*coordinated fund*).

PIP kemudian menunjuk beberapa Lembaga Keuangan Non-Bank termasuk Koperasi, untuk bertindak sebagai penyalur pembiayaan UMi. Ide awalnya terinspirasi dari misi pemerintah untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan kesenjangan ekonomi.



Diolah oleh penulis

Berdasar data Direktorat SMI Ditjen Perbendaharaan tahun 2017, penyaluran KUR oleh Bank Perkreditan Rakyat (BRI) dan beberapa bank penyalur lain mencapai angka Rp100 triliun. Dari anggaran sebesar itu, jumlah nasabahnya masih sedikit, di bawah 17 juta UMKM atau sekitar 22 persen dari keseluruhan UMKM di Indonesia. Sedangkan masih ada 44 juta pengusaha (78%) yang belum mendapatkan pembiayaan.

Pemerintah tidak bisa serta merta mengintervensi dunia perbankan agar menyalurkan KUR kepada UMKM yang belum memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, pemerintah membuat pembiayaan alternatif yang tidak memberatkan kantong APBN sehingga terbebas dari potensi kerugian negara. Maka ditunjuklah PIP yang berstatus BLU untuk mengelola pembiayaan UMi.

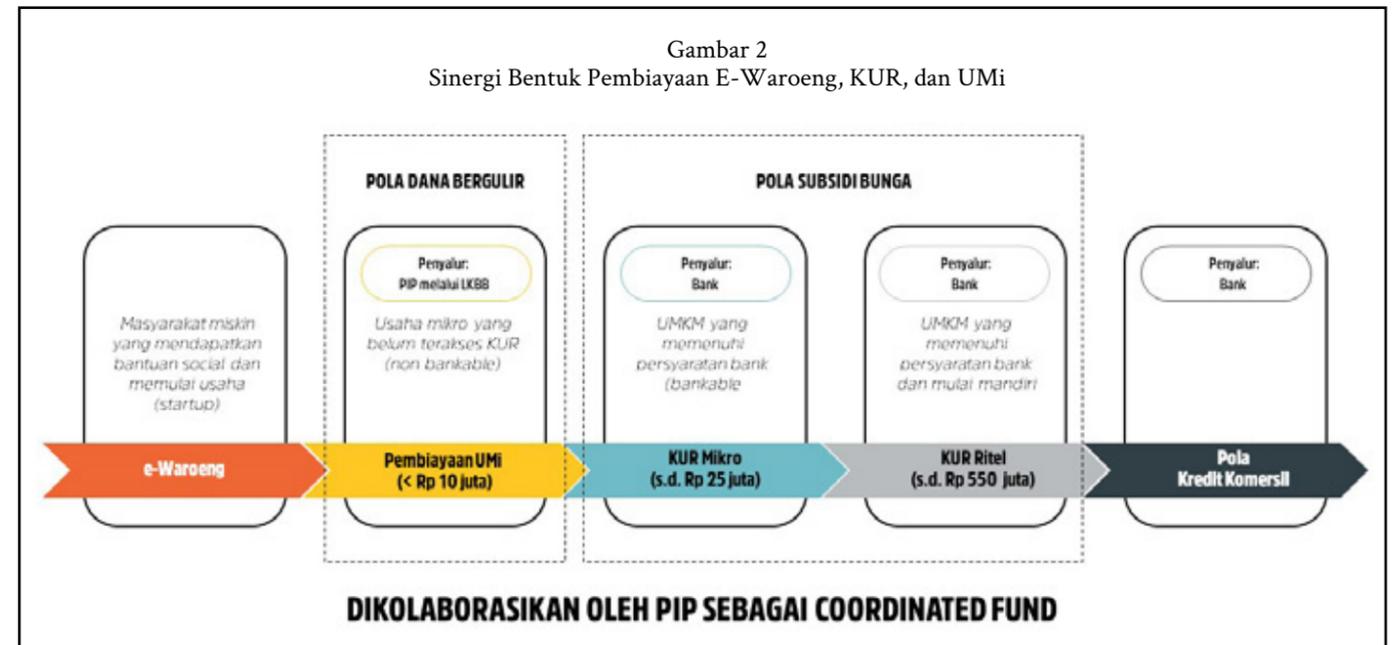
Skala pembiayaan UMi ini berkisar antara Rp1 juta-Rp10 jutaan per nasabah untuk tenor 1 tahun. Adapun tujuannya yaitu membantu masyarakat miskin untuk membuat usaha dengan jangka waktu pinjaman satu tahun dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*).

Dengan begitu ibu rumah tangga yang menjadi sasaran nasabah pembiayaan UMi dapat menambah pendapatan suami dengan berwirausaha. Hal ini selaras dengan misi pemerintah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

“Pada dasarnya pemerintah ingin mensinergikan ketiga program ini (Bansos, UMi, dan KUR) agar bansos punya motif pemberdayaan yang lebih mendidik masyarakat. Selain itu segmentasi yang berbeda dari ketiganya, perlu intervensi pemerintah agar bansos dan UMi tepat sasaran,” Syahrir menjelaskan.

3. Target dan Penyaluran Pembiayaan UMi

Grameen Bank yang dikembangkan Muhammad Yunus, pakar *microfinance* dari Bangladesh memberikan inspirasi terhadap praktik pembiayaan sederhana untuk masyarakat miskin. Peraturan ketat yang biasanya diterapkan bank kepada nasabah seperti adanya jaminan atau agunan (*bankable*), usaha harus berbadan hukum (*legal base*) serta mengutamakan nasabah individu (*individual lending*) dihilangkan.



Diolah oleh penulis dari narasumber Syahrir Ika

Model *microfinance* seperti inilah yang diterapkan dalam Pembiayaan UMi sehingga bisa dijangkau secara luas oleh masyarakat bawah tanpa aturan bisnis tertentu. Harapannya, pengaruh keekonomian dan dampak inklusi keuangan jauh lebih besar dibandingkan KUR yang nasabahnya terbatas.

Kelompok ibu-ibu rumah tangga menjadi target nasabah dalam pembiayaan UMi ini. Alasannya, ibu rumah tangga punya banyak waktu untuk berbisnis sesuai dengan *passion* dan kemampuan manajerialnya. Skema pembiayaan seperti ini biasanya disebut juga dengan “*taylor made*” dengan satu kelompok terdiri dari 15-20 orang.

PIP sebagai *coordinated fund* untuk membiayai masyarakat *not-bankable*, tidak mendirikan usaha *microfinance* baru. Akan tetapi mendorong lembaga-lembaga keuangan mikro (LKM) yang sudah ada, kompeten, dan memiliki prestasi dalam melayani pembiayaan bagi masyarakat-masyarakat yang *not-bankable*. LKM tersebut harus sesuai dengan persyaratan

yang ditetapkan pemerintah dan mampu memitigasi risiko yang dapat ditimbulkan.

LKM yang dimaksud di antaranya PT Permodalan Nasional Madani/PNM (Persero), PT Pegadaian (Persero) dan PT Bahana Artha Ventura (BAV) - anak perusahaan PT Bahana Pembangunan Usaha Indonesia/BPUI (Persero).

Amanat PMK No.22/2017 mewajibkan LKM penyalur untuk meng-*upload* data nasabah ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) sebelum PIP menyetujui penyaluran dana UMi baik *direct* dari LKM ke nasabah maupun *indirect* melalui LKM lalu ke koperasi-koperasi simpan pinjam dan kemudian ke nasabah. Kepastian akan ketepatan sasaran nasabahnya juga bisa dilakukan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Pemberdayaan Negara (KPPN) di wilayah nasabah tersebut berada.

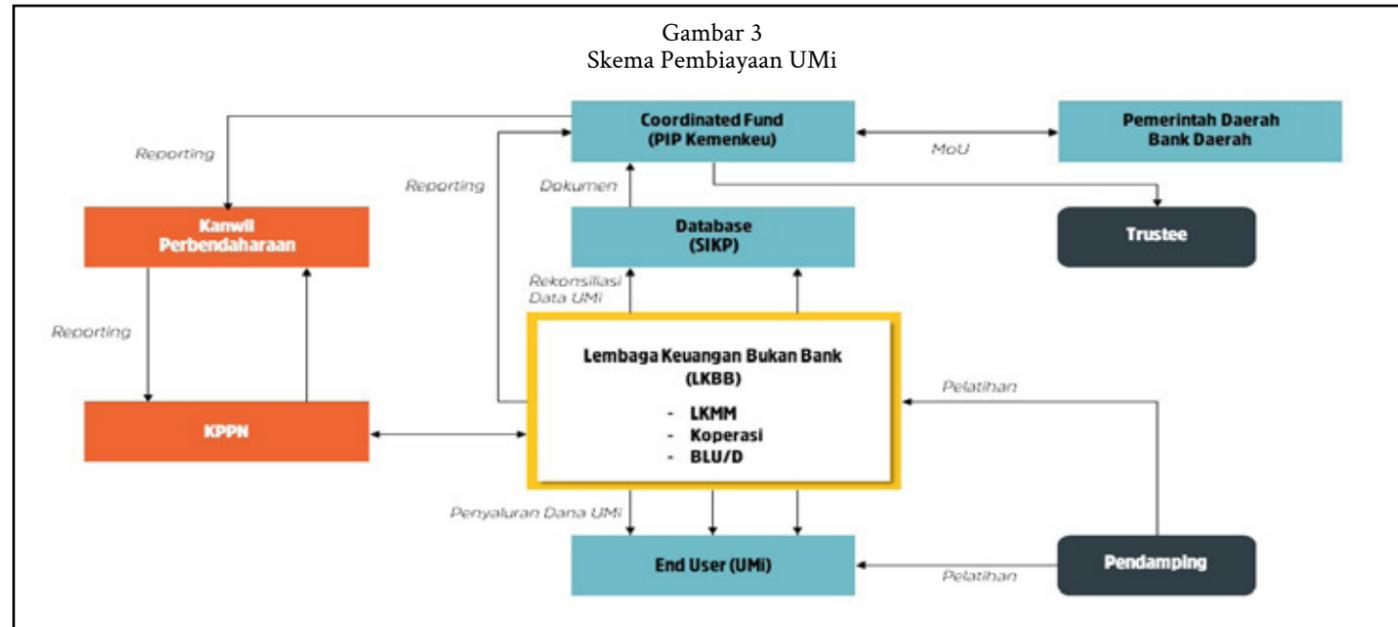
KESIMPULAN

Pada intinya dari pembiayaan UMi yang sudah diberikan kepada nasabah

akan ada evaluasi. Adakah dampak keekonomiannya? Misalnya pengeluaran yang terkait dengan makanan, non-makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan, dan jenis rumah. Sementara dampak keekonomian usaha meliputi perubahan-perubahan pada sisi aset, omzet, dan profit dari usaha para nasabah UMi. Harapannya, dengan perubahan ekonomi masyarakat miskin itu berdampak pula pada upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Beberapa hal yang seharusnya menjadi fokus pemerintah yaitu:

1. Pemerintah hendaknya mengevaluasi kembali efektivitas dana bansos yang selama ini disalurkan ke masyarakat. Perlu ditetapkan kriteria yang jelas agar efektivitasnya bisa dihitung.
2. Proses penyaluran dana bansos sebaiknya dibuat terpusat untuk memudahkan koordinasi. Pemerintah bisa menunjuk Kementerian Sosial agar terpusat di satu Kementerian untuk memudahkan koordinasi.



Diolah oleh penulis dari narasumber Syahrir Ika

- Pemanfaatan aplikasi digital dalam penyaluran bantuan sosial untuk meminimalkan adanya kecurangan.
- Program pemberdayaan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan juga sebaiknya dipusatkan pengelolaannya di salah satu Badan Layanan Umum (BLU). Fungsinya yaitu memudahkan koordinasi hingga ke tingkat daerah Kabupaten/Kota
- Pemerintah perlu melakukan survei untuk mengevaluasi beberapa banyak nasabah UMi yang berhasil naik kelas untuk mengkasas KUR. Sekaligus untuk mengetahui berapa banyak nasabah KUR yang naik kelas untuk mengakses kredit komersil perbankan. Langkah ini penting untuk membantu pemerintah memiliki pola dan peta pemberdayaan masyarakat mulai dari Bansos hingga komersil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ika, Syahrir., 2018. "Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) : Kebijakan Tatakelola Pembiayaan UMi". Disampaikan pada Temu Konsultasi Prasarana Bagi Koperasi, Khususnya Program KUR dan UMi". 29 Maret 2018. Denpasar, Bali.
- Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI, 2018. "Executive Summary: Uji Dampak Pembiayaan UMi", Jakarta.
- Kementerian Keuangan RI., 2018. "Semangat UMi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi".
- Majalah Treasuri Indonesia, Edisi Pertama 2018., Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta.
- Lan, T.Y, dkk, 2018. Indeks Kerentanan & Profil Rumah Tangga Miskin. LIPI Press, Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK/2017 tentang "Pembiayaan Ultra Mikro". Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Sobur, Alex., 2016. "Psikologi Umum". CV Pustaka Setia. Bandung.

UKM Center FEB-UI., 2018. "Laporan FGD 12 Juli 2018 : Uji Dampak Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)", Jakarta.

Laporan FGD 18 Juli 2018 : Determinant Credit Rationing Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)., Jakarta.

Laporan FGD 19 Juli 2018 : Perbandingan Model Pembiayaan Ideal pada Penerima UMi., Jakarta.

Laporan FGD 25 Juli 2018 : Pendampingan Ideal Bagi Penerima Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)., Jakarta.

Laporan FGD 26 Juli 2018 : Ultra Mikro Dan Kebahagiaan.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK

ABSTRAK

Ekstensifikasi merupakan upaya proaktif yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar melalui pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, penggalan potensi pajak, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan ekstensifikasi efektif dalam mendukung penerimaan pajak. Efektivitas diukur melalui hasil pelaksanaan ekstensifikasi dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi telah dilakukan dengan efektif. Pelaksanaan ekstensifikasi menghasilkan masing-masing penambahan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 174,89%, pengukuhan PKP mencapai 93,87%, dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebesar 155,15% dari target yang ditetapkan. Atas pencapaian tersebut dapat menghasilkan penerimaan pajak dari extra effort sebesar 123,93% dari target.

Kata kunci : ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak

PENDAHULUAN

Pemerintah membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang APBN tahun 2018, sumber pendapatan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri, penerimaan hibah, dan utang. Penerimaan dalam negeri meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Untuk menjaga kemandirian pembiayaan tersebut, pemerintah mengambil kebijakan dengan mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari dalam negeri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang bersumber dari dalam negeri yang mempunyai porsi yang dominan

Porsi penerimaan pajak terhadap keseluruhan pendapatan negara dalam APBN tahun 2018 kurang lebih 85,4% yaitu sebesar Rp1.618,1 Triliun dari Rp1.894,7 Triliun. Dari keseluruhan penerimaan pajak tersebut direncanakan sebesar Rp1.579 Triliun (97,6%)

bersumber dari penerimaan pajak dalam negeri. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pendapatan Cukai, dan Pajak Lainnya. (<https://www.kemenkeu.go.id/media/6886/informasi-apbn-2018.pdf>)

Beban tugas yang diemban DJP untuk merealisasi rencana penerimaan yang demikian besar mengharuskan DJP melakukan tugas ekstra yang antara lain dilakukan dengan mengupayakan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar, pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memberikan edukasi kepada Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang perpajakan. Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian merupakan salah satu

unit kantor pusat DJP yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang ekstensifikasi dan penilaian perpajakan.

Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan oleh DJP untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar, melalui pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai mana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-21/PJ/2015 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, ekstensifikasi dilakukan berdasarkan data dan/atau keterangan yang dimiliki atau diperoleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang mencakup kegiatan pengamatan potensi perpajakan, pengumpulan data dan informasi, serta tindak lanjut atas Wajib Pajak yang belum diterbitkan NPWP maupun yang belum dikukuhkan sebagai PKP.

Tahun 2017 kegiatan ekstensifikasi secara nasional meliputi kegiatan penambahan

Wajib Pajak Terdaftar, pengukenan PKP, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, penggalan potensi pajak, dan penerimaan pajak melalui *extra effort*. Masing-masing kegiatan tersebut direncanakan sebesar Rp20,5 Triliun untuk *extra effort*, Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi sebanyak 400.000 WP, pengukenan PKP sebanyak 616.359 WP, dan kepatuhan Wajib Pajak sebanyak 491.935 WP.¹⁾

Dari uraian tersebut di atas, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah apakah pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan telah efektif dalam mencapai penerimaan pajak. Efektivitas dalam penelitian ini akan diuji melalui realisasi hasil pelaksanaan ekstensifikasi dibandingkan dengan rencana yang ditetapkan serta kesesuaian dengan hasil penelitian sebelumnya. Ruang lingkup penelitian ini adalah pelaksanaan ekstensifikasi tahun 2017 yang dilaksanakan oleh seluruh KPP di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-21/PJ/2015, tugas dan fungsi seksi ekstensifikasi dan penyuluhan meliputi pelaksanaan ekstensifikasi, pengawasan wajib pajak baru, pelaksanaan penyuluhan perpajakan, dan pengawasan kewajiban perpajakan tertentu. Ekstensifikasi adalah upaya proaktif yang dilakukan DJP untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar, melalui pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukenan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Tujuan utama pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi adalah menambah dan meng-*update* basis data perpajakan. Selain itu, ekstensifikasi juga dilakukan untuk memberikan edukasi kepada Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak. Ekstensifikasi dilakukan berdasarkan data dan/atau keterangan yang dimiliki atau diperoleh Kantor Pelayanan Pajak (*internal*) maupun data yang diperoleh

dari pihak luar (*eksternal*). Kegiatan ekstensifikasi mencakup kegiatan pengamatan potensi pajak, pengumpulan data dan informasi, serta tindak lanjut atas Wajib Pajak yang belum diterbitkan NPWP maupun yang belum dikukuhkan sebagai PKP.

Pengawasan Wajib Pajak Baru adalah upaya aktif yang dilakukan DJP untuk mengawasi penghitungan, pembayaran atau penyetoran, dan pelaporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak Baru. Wajib Pajak Baru terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak Baru meliputi Wajib Pajak terdaftar pada tahun berjalan, Wajib Pajak terdaftar sejak tahun sebelumnya, dan Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta belum pernah melakukan pembayaran atau penyetoran pajak untuk pertama kali sejak terdaftar (WP TLTB).

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Penyuluhan perpajakan dilakukan terhadap calon Wajib Pajak dan Wajib Pajak terdaftar. Penyuluhan perpajakan dilakukan agar Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak dapat mengetahui peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Khusus untuk Wajib Pajak yang telah terdaftar diharapkan dapat mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Penyuluhan dapat dilakukan dengan mengundang Wajib Pajak dan Calon Wajib Pajak atau petugas pajak yang mendatangi Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak tertentu, seperti melalui asosiasi, perkumpulan, tempat kerja dan lainnya.

Pengawasan kewajiban perpajakan tertentu merupakan upaya aktif yang dilakukan untuk mengawasi kepatuhan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS) dan Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, yang

dilakukan terhadap seluruh Wajib Pajak terdaftar.

2. Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak

Besar kecilnya penerimaan pajak tidak bisa dilepaskan dari kondisi perekonomian suatu negara. Bahkan Direktur Jenderal Pajak menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak di Januari 2018 cukup mengembirakan dibandingkan tiga tahun ke belakang adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus.²⁾

Secara makro ekonomi, Sovita dan Arta (2018) yang melakukan penelitian terhadap penerimaan negara sebagai variabel dependen dan belanja modal serta pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen, menemukan bahwa variabel belanja modal mempunyai pengaruh yang dominan. Di mana variabel belanja modal didefinisikan sebagai jumlah uang yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal dan jasa (dalam persentase).

Selain pertumbuhan ekonomi, faktor kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan, penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar, sosialisasi perpajakan, pemeriksaan Wajib Pajak juga berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak (Marwah : 2014, Wulandari : 2015).

Di sisi lain Yuli Tri Cahyono, (2017) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dari enam variabel yang diteliti hanya variabel persepsi WP terhadap kualitas pelayanan yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sedangkan variabel *tax evasion*, tingkat kepatuhan, *self assessment system*, kesadaran WP, tingkat kesadaran tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan analisis

deskriptif. Menurut Indrawan dan Poppy, (2014) pendekatan kuantitatif adalah suatu bentuk penelitian ilmiah yang mengkaji satu permasalahan dari suatu fenomena, serta melihat kemungkinan kaitan atau hubungannya antar variabel dalam permasalahan yang ditetapkan. Sugiyono dalam Kezia, (2016) mendefinisikan analisis deskriptif adalah metode analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Penelitian dilakukan atas laporan pelaksanaan ekstensifikasi tahun 2017 yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) di seluruh Indonesia dan dihimpun oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. KPP Pratama merupakan instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP. Saat ini terdapat sebanyak 33 unit Kantor Wilayah DJP serta 309 unit KPP Pratama di seluruh Indonesia, selain KPP Madya sebanyak 19 unit dan KPP Wajib Pajak Besar sebanyak 4 unit. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, tugas pokok unit Kanwil DJP adalah melaksanakan koordinasi, bimbingan, pengendalian, analisis, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas KPP, serta penjabaran kebijakan dari kantor pusat.

Sedangkan tugas pokok unit KPP Pratama adalah melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan kepada wajib pajak.

Data penelitian terdiri dari data sekunder yang merupakan laporan pelaksanaan ekstensifikasi selama tahun 2017 yang dilakukan oleh masing-masing KPP Pratama yang tersebar di seluruh Indonesia. Data laporan masing-masing KPP Pratama dihimpun secara berjenjang melalui Kantor Wilayah DJP dan dihimpun oleh Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian sebagai pembina teknis pelaksanaan ekstensifikasi.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan evaluasi kinerja tahun 2017 terdapat delapan kegiatan utama yang dilakukan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, KPP Pratama di seluruh Indonesia. Secara lengkap kegiatan yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tujuan utama kegiatan ekstensifikasi adalah penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar meliputi penambahan jumlah NPWP dan pengukenan PKP. Penambahan jumlah NPWP terdiri atas Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, Non Karyawan, Bendahara, dan Wajib Pajak Badan. Tahun 2017 target penambahan jumlah NPWP sebanyak

Tabel 1
Evaluasi Kinerja Ekstensifikasi Tahun 2017

No.	Kegiatan	Rencana	Realisasi	% Realisasi
1	<i>Extra effort</i> Penerimaan (Rp)	20.499.440.243.741	25.404.182.181.948	123,93
2	WP Baru hasil Ekstensifikasi (NPWP)	400.000	699.566	174,89
3	Pengukenan PKP (PKP)	616.359	578.570	93,87
4	Kepatuhan WP Baru (WP)	491.935	763.241	155,15
5	Jumlah WP <i>Geotagging</i> (WP)	18.399.859	20.756.579	112,81
6	Pokok Ketetapan PBB P3L (Rp)	18.874.036.447.202	17.052.971.612.788	90,35
7	Penerbitan SPPT PBB (SPPT)	9.792	10.314	105,33
8	Penerimaan PBB P3L (Rp)	15.412.100.000.000	16.776.000.020.892	108,85

Sumber : Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, 2018

¹⁾ Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, 2018

²⁾ <https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-januari-2018-tertinggi-ini-faktornya>

sebesar Rp25.404.182.181.948,00 atau sebesar 123,93%. Hasil ini membuktikan bahwa penambahan jumlah WP terdaftar berbanding lurus dengan penambahan jumlah penerimaan pajak, khususnya hasil ekstensifikasi.

Sesuai tugas dan fungsi seksi ekstensifikasi dan penyuluhan dalam melakukan pengawasan Wajib Pajak meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Pengawasan Wajib Pajak yang dilakukan seksi ekstensifikasi dan penyuluhan terdiri dari Wajib Pajak terdaftar tahun berjalan dan Wajib Pajak terdaftar tahun sebelumnya serta Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan SPT dan belum pernah melakukan pembayaran pertama kali sejak terdaftar (WP TLTB). Pengawasan Wajib Pajak juga dilakukan terhadap Wajib Pajak baru yang sudah atau belum dikukuhkan sebagai PKP. Ruang lingkup pengawasan yang dilakukan seksi ekstensifikasi dan penyuluhan antara lain meliputi pengawasan kewajiban pelaporan SPT, pengawasan kewajiban pembayaran atau penyetoran, dan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan.

Dari tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa kepatuhan WP Baru direncanakan sebanyak 491.935 dan realisasinya sebanyak 763.241 atau mencapai 155,15%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa tugas memberikan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak dapat dilakukan dengan efektif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marwah (2014) dan Wulandari (2015) menyatakan bahwa sosialisasi kepada Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Sosialisasi meliputi kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi diukur dari jumlah target yang direncanakan dibandingkan dengan realisasi yang dapat dicapai. Berdasarkan

uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ekstensifikasi yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi dan penyuluhan di KPP Pratama diseluruh Indonesia tahun 2017 telah dilakukan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Adanya penambahan jumlah Wajib Pajak Baru terdaftar sebagai hasil kegiatan ekstensifikasi melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 174,89%, walaupun disisi lain jumlah Pengukuhan PKP hasil ekstensifikasi hanya mencapai 93,87% namun masih dapat dikategorikan baik;
2. Kepatuhan Wajib Pajak Baru hasil ekstensifikasi dapat melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar 155,15%; dan
3. Adanya kelebihan penerimaan pajak hasil *extra effort* yang mencapai 123,93% dari target yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Sugiyono, Prof. DR (2015). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta. Bandung
- Indrawan, Rully & Yuniawati, Poppy (2014). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Refika Aditama, Bandung
- Anggun Puspari. (2016). *Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak*. Website : <http://www.jurnal.untan.ac.id>
- Hasliani Mayaswari Hisnani (2012). *Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu*.

Website : <http://www.thesis.binus.ac.id>

Ingra Sovita, Enny Arita. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Negara Di Indonesia Selama Tiga Dekade Terakhir*, *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas Vol 20 No 1, Januari 2018*.

Rizki Wulandari. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama*. *Perbanas Review Vol 1 November 2015*. File:///C:/Users/Personal/Downloads/11.39.1-PB%20(1).pdf

Kezia Ayu Hehakaya. (2016). *Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang)*. Website : <http://www.elib.unikom.ac.id>

Widdyah Sukmawati, Darminto, Devi Farah Azizah. (2014). *Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)*. Website : <http://www.media.neliti.com>.

Pancawati Hardiningsih. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan, November 2011, Vol 3*. Website : www.unisbank.ac.id

Welly Surjono. (2016). *Peranan Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Efektivitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I Bandung*, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 4(1) 2016* Website : <http://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK>

Yuli Tri Cahyono. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak (Studi Empirik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta)*. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2(2), 2017*. Website: <http://journal.ums.ac.id/index.php/reaksi/article/view/4923>

RETYAN LAKSITA MUTIARY

PEMBATASAN BELANJA ONLINE LUAR NEGERI



Tanggal 11 bulan 11 sering dijadikan sebagai hari keberuntungan untuk banyak orang. Angka cantik 11.11 ini biasanya menjadi angka keramat bagi sebagian besar orang yang masuk dalam tim pemburu diskon belanja *online*. Betul apa betul?

Melimpahnya promo, gratis ongkir (ongkos kirim), lebih menghemat waktu dan tenaga juga, pembeli bisa membandingkan harga barang dari *e-commerce* satu ke *e-commerce* yang lain sehingga mendapatkan penawaran terbaik, dan pastinya lebih banyak varian yang bisa dipilih. Itulah beberapa alasan mengapa masyarakat Indonesia mulai beranjak dan beralih belanja secara *online*. Bahkan tak jarang ada pembeli yang gemar belanja barang yang hanya diproduksi di luar negeri, sehingga mereka harus memesan dahulu agar kebutuhan terpenuhi.

Anda termasuk tim yang mana? tim yang masih setia dengan belanja model konvensional atau model *online*? Lalu apakah Anda juga orang yang gemar belanja barang-barang luar negeri? Lantas jika belanja barang luar negeri secara *online* apakah ada aturannya?

Menurut Heru Pambudi, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, terbitnya aturan tentang impor barang kiriman itu bukan berarti pemerintah melarang masyarakat untuk membeli atau membawa barang dari luar negeri. Menurutnya, yang lebih ditekankan adalah untuk menghindari penyalahgunaan *fasilitas de minimis value* (nilai pembebasan) untuk tujuan komersial.

Namun tahukah Anda? Tidak semua barang dapat bebas masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat barang impor yang pemasukannya dilarang ataupun dibatasi impornya. Biasanya disebut dengan istilah LARTAS (Larangan dan Pembatasan). Impor barang dapat dilakukan setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang. Dalam proses pengiriman, terkadang beberapa

orang kerap mendapatkan masalah seperti bea masuk tidak jelas, barang ditahan, barang diacak, bungkus jadi rusak, atau barang sampai ke tangan konsumen sangatlah lama. Alhasil hal ini menjadikan konsumen merasa kurang nyaman.

APA ITU LARTAS?

Istilah ini sering ditemukan dalam pembicaraan terkait perdagangan internasional, baik itu impor maupun ekspor. Beberapa barang memang dilarang dan dibatasi untuk diperdagangkan lintas negara (ekspor-impor). Barang-barang ini memerlukan izin agar importasi atau eksportasi dapat dilakukan.

Tidak semua barang terkena LARTAS. Ada juga barang bebas LARTAS yang artinya tidak memerlukan izin untuk diimpor maupun diekspor. Barang yang terkena LARTAS pun, dalam hal tertentu bisa mendapatkan pengecualian.

LARTAS diterbitkan oleh Instansi Teknis Terkait, yaitu Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian Tingkat Pusat yang menetapkan peraturan LARTAS impor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan.

Untuk meyakini apakah barang kiriman impor termasuk LARTAS atau tidak, harus melalui:

1. Pengecekan yang dilakukan sebelum impor, apakah barang yang akan diimpor termasuk dalam LARTAS apa tidak.
2. Melalui website INSW di <http://eservice.insw.go.id/> menu "Lartas Information". Untuk Pengecualian Lartas Barang Kiriman dapat dilihat "Aturan Pengecualian Lartas Barang Kiriman" di Peraturan.
3. Bila barang yang akan diimpor termasuk barang LARTAS, maka harus melakukan pengurusan perizinan sesuai ke Kementerian atau Lembaga yang menetapkan barang LARTAS.

Contoh barang LARTAS:

- Produk makanan, minuman, obat-obatan harus memperoleh persetujuan dari BPOM; untuk tujuan penelitian termasuk uji klinik, pengembangan produk, sampel registrasi, bantuan/hibah/donasi, tujuan pameran dan penggunaan sendiri, dapat melalui mekanisme jalur khusus yaitu dengan mengajukan Ijin SAS (*Special Access Scheme*) ke BPOM;
- Produk Kosmetika harus memperoleh persetujuan dari BPOM berupa SKI (Surat Keterangan Impor);
- Telepon Seluler, Komputer Genggam (*Handheld*) dan Komputer Tablet hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) unit (Peraturan Menteri Perdagangan);
- Pakaian jadi hanya diperbolehkan maksimal 10 (sepuluh) pcs (Peraturan Menteri Perdagangan);
- Produk Elektronik hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) unit (Peraturan Menteri Perdagangan);
- Produk hewan, tumbuhan dan ikan harus memperoleh izin pemasukan dari Badan Karantina;
- Produk senjata api, *air softgun* dan peralatan sejenis harus mendapatkan izin dari Kepolisian.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS BARANG DARI LUAR NEGERI YANG DIBELI SECARA ONLINE

1. Pembebasan Bea Masuk

Jika ditanya, "Mau beli barang dari luar negeri dan bebas pajak?" pasti jawabannya *mau banget dong*. Nah bagi Anda yang belum tahu bagaimana cara untuk mendapatkannya, pastikan nilai barang yang dibeli dalam satu paket tidak lebih dari 75 dolar AS karena untuk barang kiriman dengan nilai di bawah 75 dolar AS per kiriman per hari akan dibebaskan dari bea masuk dan pajak impor.

Bagaimana jika nilai impor yang dilakukan satu orang lebih dari 75 dolar AS per hari? bea masuk dan pajak dalam rangka impor

(PDRI) dipungut atas seluruh nilai pabean Barang Kiriman. Yang termasuk dalam PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Impor (PPh22), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

2. Pembebasan Cukai Atas Barang Kiriman

Perlu kita pahami dulu yang dimaksud dengan barang kena cukai merupakan barang-barang tertentu karena mempunyai sifat konsumsi perlu dikendalikan, peredaran diawasi, pemakaian mempunyai dampak negatif kepada masyarakat atau lingkungan hidup, atau barang yang perlu dikenakan pungutan.

Namun di sini terdapat pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor untuk setiap penerima barang kiriman berupa barang kena cukai, dengan jumlah paling banyak:

40 batang sigaret, 10 batang cerutu, atau 40 gram tembakau iris, atau 40 ml hasil tembakau lainnya (vape misalnya).

350 ml minuman yang mengandung etil alkohol.

Bagaimana jika melebihi dari jumlah yang ditentukan? atas kelebihan barang kena cukai tersebut akan dimusnahkan oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan Penyelenggara Pos yang bersangkutan.

PROSEDUR PENGELUARAN BARANG KIRIMAN

1. Dilakukan pemeriksaan pabean secara selektif berdasarkan manajemen risiko, meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik
2. Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang wajib dilunasi;
3. Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai dengan nilai pabean paling banyak FOB USD 75.00 dapat

diberikan pembebasan bea masuk;

4. FOB USD 75.00 s.d USD 1,500 perhitungan bea masuk ada 2 opsi :
 - Tarif tunggal 7,5% *official assessment*
 - Tarif umum (MFN) menggunakan PIB/PIBK, *self-assessment*
5. Lebih dari USD 1,500 Tarif umum (MFN) menggunakan PIB/PIBK, *self-assessment*

KEBERATAN ATAS PENETAPAN

Dengan berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016, telah dijelaskan di atas alasan mengapa perlu ada aturan tentang ketentuan impor barang kiriman ini.

Maka dari itu jika ada penerima barang yang keberatan dengan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk maka dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar.

Penyesuaian impor barang kiriman tersebut akan cukup efektif untuk menekan impor barang kiriman. Optimisme kebangkitan industri dalam negeri harus diiringi upaya-upaya yang secara signifikan mampu mendorong meningkatnya volume penggunaan produk dalam negeri.

Jika Anda ingin produksi dalam negeri tak kalah bersaing dengan produksi luar negeri, maka "Cintailah produk-produk dalam Negeri".

Sumber: Dari Kemenkeu Learning Center (SWAP - Kamu Harus Tahu! Sebelum Belanja Online Luar Negeri) dan berbagai sumber.

"Terbitnya aturan tentang impor barang kiriman itu bukan berarti pemerintah melarang masyarakat untuk membeli atau membawa barang dari luar negeri. Menurutnya, yang lebih ditekankan adalah untuk menghindari penyalahgunaan *fasilitas de minimis value* (nilai pembebasan) untuk tujuan komersial."



PUTRI DEWI AYU PRASTIKA

SELALU GAGAL DI TAHAP INTERVIEW?

Intip Langkah-langkah Berikut Ini



Wawancara atau *interview* adalah tahapan yang biasa dilalui baik ketika seseorang melamar pekerjaan, mendaftar pendidikan, atau masuk ke sebuah organisasi. Sosiolog asal Amerika, Kristin G. Esterberg mengungkapkan bahwa wawancara merupakan pertukaran informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

Salah satu tahapan rekrutmen yang bersifat krusial ini terkadang justru menjadi batu sandungan yang mengerikan bagi sebagian orang. Beberapa poin penting yang sangat menentukan keberhasilan *interview* justru gagal dilakukan karena kesalahan yang tanpa sengaja dilakukan. Banyak dari kita yang mahir dalam mengerjakan puluhan bahkan ratusan soal ujian, tetapi terbata-bata saat mempresentasikan diri. Bahkan, tidak sedikit orang yang merasa tidak cakap dalam berbicara padahal memiliki kemampuan intelegensi yang mumpuni.

Selain berlatih menulis *resume*, mempersiapkan diri secara optimal dapat memberikan kesan yang baik dan membuat pewawancara (*interviewer*) yakin akan kemampuan kita. Lalu, apa saja yang perlu diterapkan untuk mempersiapkan diri sebelum *interview*?

Pertama, siapkan diri anda untuk memahami semua format dalam *interview*. Sebaiknya, tanyakan secara detail format *interview* apa yang akan diterapkan. Jika *interview* dilakukan secara langsung, tanyakan dengan detail siapa dan apa jabatan *interviewer*. Dengan demikian, anda akan lebih memahami apa yang akan dihadapi dan mempersiapkan jawaban yang sesuai untuk meyakinkan *interviewer*.

Kedua, fokus pada kontribusi yang bisa diberikan. Ingat, apabila sudah memasuki tahap *interview*, berarti pihak perekrut telah mempelajari rekam jejak karir dan pengalaman Anda. Oleh karena itu, jelaskan saja kontribusi yang dapat dilakukan nantinya. Tidak perlu berlebihan, jawablah sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dimiliki. Untuk menambah nilai *plus*, tanyakan tentang masalah yang tengah dihadapi dan berikan solusi cara mengatasinya. Jika perlu, berikan contoh dari apa yang sudah pernah dilakukan sebelumnya untuk menghadapi masalah serupa.

Ketiga, siapkan list pertanyaan dan berlatih menjawabnya. Untuk dapat menjawab pertanyaan *interviewer* dengan mudah, dapat dilakukan dengan mencari referensi pertanyaan-pertanyaan umum yang sering diajukan oleh *interviewer*. Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kondisi yang sebenarnya dan hindari berbohong. Setelah itu, cobalah untuk berlatih menyampaikan jawaban dengan cara berdiri di depan kaca atau meminta bantuan orang lain untuk mengoreksi sekaligus menilainya.

Keempat, perhatikan *body language*. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah menjabat tangan *interviewer* dengan mantap. Hal ini dapat menunjukkan profesionalitas dan kepercayaan diri. Selain itu, perhatikan *eye contact* saat berbicara dengan *interviewer* tetapi dengan tidak berlebihan menatap. Saat menjawab pertanyaan, pastikan pandangan mata dan posisi badan mengarah ke *interviewer*. Hal tersebut menunjukkan Anda respek ke *interviewer*.

Kelima, persiapkan fisik dan mental. Mempersiapkan fisik dan mental bukan hanya untuk mengikuti lomba olahraga saja, pun saat akan melakukan *interview*. Karena ketika tubuh dalam kondisi sakit atau keadaan tidak sehat, tentunya akan

sangat berpengaruh pada proses *interview*. Oleh karena itu, jaga kesehatan dengan mengatur pola makan, istirahat yang cukup, rajin berolahraga dan hindari begadang.

Selain fisik, mental juga harus dilatih karena saat *interview* Anda akan dihujani sejumlah pertanyaan. Penting untuk menjaga fokus dan konsentrasi agar dapat menjawab pertanyaan dengan baik.

Keenam, sugesti, motivasi dan semangat diri. Penting melakukan sugesti diri sebelum melakukan *interview*, terlebih bagi yang mudah patah semangat sebelum berjuang. Selalu buat diri yakin bahwa semua bisa dilakukan dan yakinkan pada diri sendiri bahwa Anda bisa melakukannya. Selain itu, temukan motivasi dan tujuan utama mengikuti *interview* untuk menjadi pemicu kobaran semangat saat takut menghadapi *interview*.

Terakhir, berdo'a. Dalam setiap apa yang kita lakukan tidak akan lepas dari campur tangan Sang Pencipta. Sebelum melakukan *interview* berdoalah agar dipermudah dan dilancarkan hingga selesai proses tersebut.

Itulah beberapa langkah yang dapat dilakukan sebelum melakukan *interview*. Lakukan yang terbaik, sesuai prosedur dan nikmati prosesnya. Ingat proses tidak mengkhianati hasil jika dilakukan dengan sungguh-sungguh. Disertai dengan niat yang ikhlas, maka yakinlah yang Anda lakukan dapat membuahkan hasil.

BAGUS WAHYU PRASETYO

Alumni Magister Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia

Meraih Mimpi dari Dalam Negeri

“SDM unggul, Indonesia Maju” merupakan salah satu perhatian utama pemerintah untuk mewujudkan visi 100 tahun Indonesia merdeka yaitu menjadi bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Bukan hanya menjadi jargon semata, keseriusan pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia diwujudkan pada APBN 2020 yang berfokus pada pembangunan Sumber Daya Manusia. Demikianlah yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan di salah satu media cetak nasional. Salah satu bukti keseriusan pemerintah dalam pengembangan SDM ini adalah salah satunya membentuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dapat mewujudkan mimpi masyarakat dari semua kalangan untuk dapat menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya.

Di lingkungan Kementerian Keuangan, keseriusan Pemerintah dalam pengembangan kompetensi SDM selalu menjadi prioritas untuk menuju arah yang lebih baik. Pengembangan tersebut dapat berupa diklat kompetensi teknis maupun program beasiswa pendidikan formal dalam berbagai program, mulai dari diploma alih program sampai dengan doktoral. Pada pendidikan formal, menjadi bagian dari penugasan sebagai karyasiswa tersebut merupakan impian bagi sebagian besar pegawai Kementerian Keuangan. Tingginya animo untuk menjadi bagian dari karyasiswa dapat menjadi salah satu pertanda bagus, bahwa banyak pegawai yang merasa “haus” akan pengembangan kompetensinya.

Saya memulai karir di Kemenkeu dengan latar belakang pendidikan terakhir DI di

tahun 2003. Mempunyai impian untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi merupakan satu rangkaian panjang perjalanan yang harus dilalui tahap demi tahap. Puji Tuhan, saya diberikan rejeki untuk melewati tahapan tersebut mulai dari melanjutkan DIII Alih Program (dahulu DIII Khusus) sampai pada akhirnya di 2018 yang lalu saya dapat menyelesaikan jenjang S2 dengan status sebagai karyasiswa Kemenkeu melalui program TOPP-LPDP di Universitas Indonesia.

BEASISWA DALAM NEGERI

Menjalani kehidupan belajar di dalam negeri menurut saya menjanjikan keuntungan yang tidak didapatkan ketika belajar di luar negeri. Di awal perkuliahan biasanya kita akan disibukkan dengan adaptasi, baik adaptasi dengan materi perkuliahan (terlebih jika program yang diambil tidak linier dengan program sebelumnya) maupun adaptasi dengan lingkungan baru. Di dalam negeri, mahasiswa hanya perlu fokus pada proses adaptasi di perkuliahan karena pada umumnya tiap mahasiswa sudah memahami kultur lingkungan di Indonesia. Jika berada di luar negeri, mahasiswa harus beradaptasi dengan berbagai hal yang tidak bisa dipelajari misalnya cuaca, makanan, atau yang paling penting adalah terpisah dengan keluarga untuk sementara waktu.

Di program beasiswa yang saya jalani, kami dikumpulkan dari berbagai unit eselon I di Lingkungan Kemenkeu yaitu Setjen, DJP, DBC, dan BKF. Program

beasiswa kami ini didesain secara khusus untuk mempelajari bidang perpajakan dari sudut pandang ilmu ekonomi yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Suatu keuntungan bagi kami bahwa setiap teman dapat menjadi narasumber untuk tiap topik perkuliahan dalam diskusi kecil, baik yang dilakukan di kantin maupun ruang belajar sehingga tanpa disadari kami menciptakan sendiri kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi yang berfaedah walaupun ditambahi sedikit diskusi yang “unfaedah” supaya tidak tertekan dengan kondisi.

Berkat kelompok-kelompok kecil tersebut, angkatan kami dapat dibilang cukup sukses menyelesaikan penugasan dengan baik. Fasilitas kampus yang menyediakan sarana belajar dalam kelompok kecil menjadikan kami bersemangat untuk belajar bersama. Selain itu, mengejar kereta bersama selepas menjalani aktifitas kampus juga menjadi sebuah ritual yang jarang kami lewatkan. Kebersamaan seperti itulah yang dapat menjadikan kami bersemangat untuk melewati masa perkuliahan. Semakin sering kami bersama semakin banyak *support* yang didapatkan. Bahkan kami mempunyai satu jargon angkatan yang bermula dari kebiasaan kami mengejar kereta yaitu “salam satu gerbong” yang menandakan kami saling *support* satu sama lain sehingga diharapkan tidak ada yang tertinggal kereta.

Tidak perlu khawatir dengan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia selama kita memilih universitas yang tepat untuk memenuhi kebutuhan akademis yang

kita inginkan. Karena perkuliahan kami bisa dikatakan *tailor made*, maka tenaga pengajar juga diisi oleh para ekonom yang berkompeten di bidangnya. Para ekonom seperti Prof. Iwan Jaya Azis, Prof. Emil Salim, Prof. Robert Arthur Simanjuntak, Prof. Aris Ananta, dan Dr. Raksaka Mahi kerap menghiasi perkuliahan kami. Selain itu, beberapa pakar perpajakan seperti Prof. James Alm, Prof. Mardiasmo, Rubino Sugana, dan Heru Pambudi juga pernah mengisi sesi khusus di perkuliahan.

Tidak banyak hambatan yang kami temui selama berkuliah di dalam negeri. Peran serta komponen dan anggota kelas turut berperan besar untuk meminimalisir hambatan yang ada karena fungsi komunikasi berjalan dengan lancar antara kelas, prodi, dan PPSDM.

OUTPUT DAN OUTCOME

Bukanlah sebuah masalah besar ketika kita menjalani penugasan karyasiswa di dalam negeri. Yang saya yakini adalah sebuah input yang bagus jika dikelola dengan bagus maka akan menghasilkan output yang bagus pula. Seleksi beasiswa di Kemenkeu sudah memberi jaminan akan adanya input yang bagus, begitu pula kampus tujuan yang ditunjuk juga melalui penilaian yang objektif oleh Kementerian. Sehingga saya meyakini bahwa sebuah proses yang bagus tersebut akan menghasilkan produk yang bagus pula.

Saya bangga, sebagai karyasiswa dalam negeri saya dapat memberikan sesuatu sebagai balasan atas segala fasilitas yang

didapatkan selama menjalani perkuliahan. Sebagai output dalam proses selama dua tahun belajar, saya dapat menerbitkan penelitian saya yang bertemakan cukai di British Medical Journal, yaitu sebuah Jurnal yang terindeks *Scopus* dengan kualifikasi Q1. Suatu pencapaian tertinggi di lingkungan akademisi seluruh dunia, yang biasanya didominasi oleh akademisi luar negeri. Hal tersebut menandakan bahwa kampus di dalam negeri juga memiliki kualitas yang tidak kalah bagus dengan kampus di luar negeri.

Namun tidak berhenti di output, semoga para alumni karyasiswa (termasuk saya) ini diharapkan juga dapat memberikan *outcome* yang positif kepada Kemenkeu. Kita tidak dapat menutup mata bahwa masih banyak kekurangan dan keteringgalan pada sistem *governance* kita, sehingga hal tersebut menjadi tugas bagi seluruh pegawai terutama karyasiswa untuk dapat memberikan sesuatu yang baru yang dapat memberikan perubahan yang berarti bagi Kementerian Keuangan dan dapat mewujudkan visi Indonesia Maju.

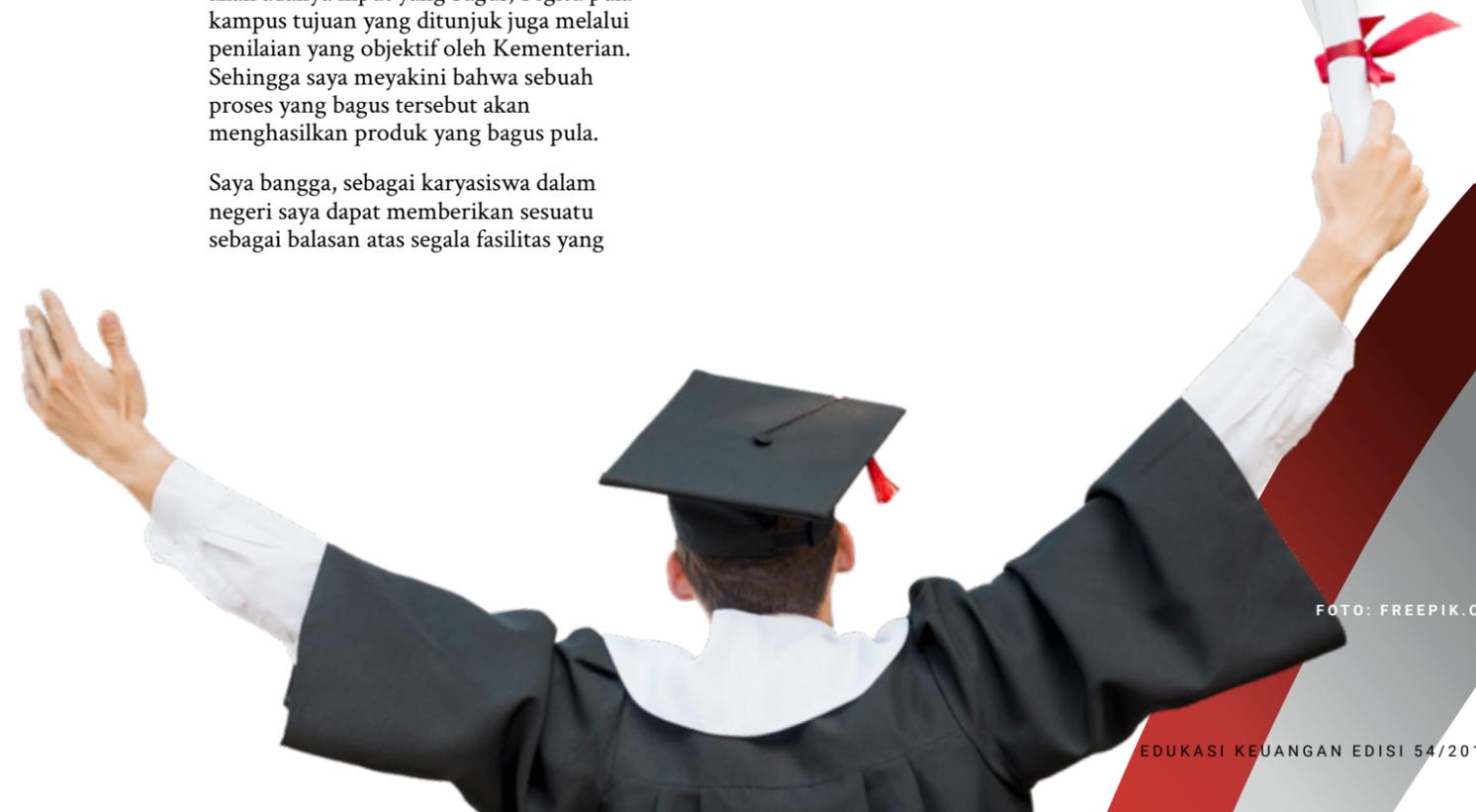


FOTO: FREEPIK.COM

BIMO ADI

TIPS MEMBUAT VIDEO SINEMATIK

Dalam membuat video untuk kepentingan pembelajaran, company profile, atau dokumentasi acara, tentunya kita ingin menghasilkan video yang berkualitas, tidak hanya dari segi konten, namun juga enak ditonton dan terlihat profesional. Salah satu caranya adalah dengan menambahkan 'feel' sinematik di video yang kita buat.

Pernahkah Anda mencoba membandingkan antara film bioskop dengan sinetron di televisi? Gambar di film entah bagaimana terlihat lebih keren, atau dengan kata lain lebih sinematik. Sementara gambar di sinetron, meskipun sama bagusnya, namun terlihat biasa saja. Hal ini disebabkan banyak faktor. Dalam artikel ini kita akan mencoba membahas tips dan trik bagaimana agar video yang kita produksi terlihat lebih sinematik seperti layaknya film.

FRAME RATE

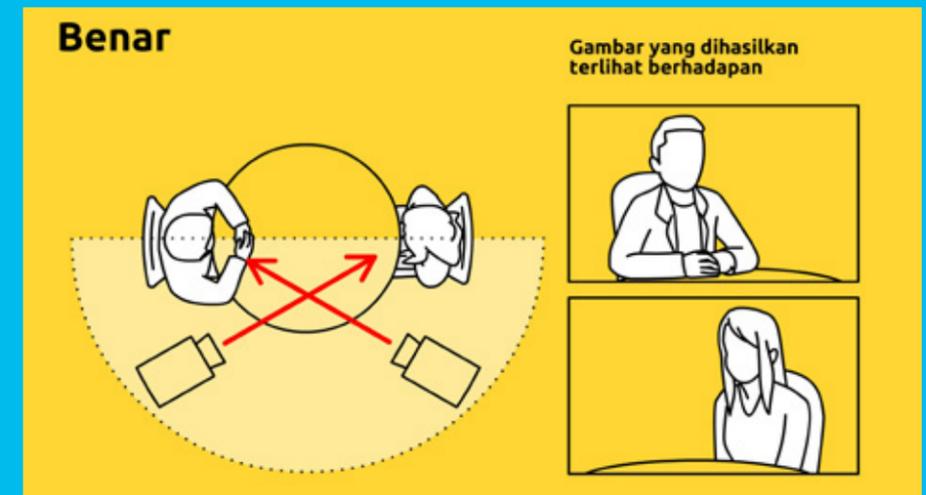
Video adalah kumpulan gambar yang ditampilkan secara berurutan sehingga seakan-akan terlihat bergerak. *Frame rate* atau biasa diukur dengan *frame per second* (fps) adalah jumlah gambar yang ditampilkan dalam satu detik. Makin banyak jumlah gambarnya, makin halus gambar yang ditampilkan. Umumnya video direkam di 50 fps atau 60 fps.

Nah, untuk menghasilkan gambar yang sinematik, kita justru harus menurunkan FPS-nya. Mengapa demikian? *Frame rate* yang tinggi menghasilkan gambar yang terlalu nyata, dan justru akan menghasilkan gambar seperti video dokumentasi biasa. Bioskop umumnya diputar di 24 fps. Karena Indonesia menggunakan sistem PAL atau 50 fps, maka kita bisa menurunkan *frame rate* ke angka 25 fps.

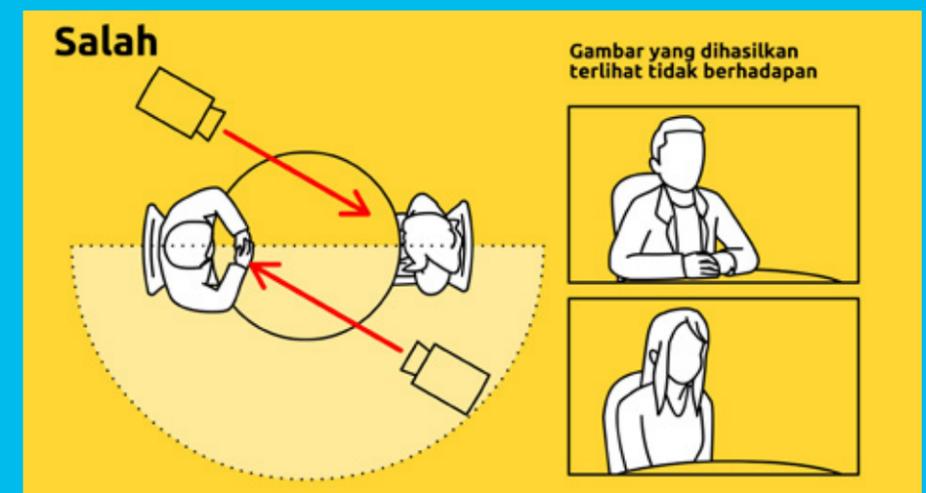
CONTINUITY

Dalam membuat film, kita harus memastikan agar penempatan objek dalam suatu adegan konsisten dan sesuai dengan logika. Artinya penempatan properti, posisi atau gerakan, maupun akting harus konsisten di setiap adegan. Sesuai logika, artinya jika kita membuat adegan dialog antar dua orang, maka kita harus membuat agar kedua orang tersebut terlihat saling berhadapan dalam *frame*.

Gambar 1
Penempatan kamera di luar 180 degree rule.



Gambar 2
Penempatan kamera di dalam area 180 degree rule.



Perhatikan Gambar 1, kamera yang merekam wanita berada di luar area *180 degree rule* sehingga wanita dan pria jadi terlihat sama-sama menghadap ke kanan. Ini membuat kedua aktor tersebut seakan seperti saling mengejar. Seharusnya penempatan kamera berada di dalam area *180 degree rule* seperti pada Gambar 2. Di sini pria menghadap ke kanan, wanita menghadap ke kiri, sehingga terlihat saling berhadapan sesuai dengan logika orang yang sedang berdialog.

LIGHTING

Lighting atau pencahayaan merupakan elemen utama yang menentukan kualitas gambar dalam film. Dalam film, *lighting* bukan sekadar mengambil sumber cahaya seadanya dari lokasi syuting, melainkan

benar-benar memasang berbagai macam lampu secara detail. Berikut ini tips yang perlu diperhatikan dalam penerapan *lighting*:

1. Sejalan dengan sistem PAL, Indonesia menggunakan frekuensi listrik 50Hz. Itu artinya, saat melakukan perekaman *indoor* yang membutuhkan lampu, gunakan setting 50 fps dengan *shutter speed* 1/100, atau 25 fps dengan *shutter speed* 1/50. Mengapa harus 50? Hal ini dilakukan untuk menjaga agar gambar yang dihasilkan tidak *flickering* (kadang terang, kadang redup).
2. Saat melakukan perekaman *outdoor*, sebenarnya tidak masalah menggunakan fps berapapun, karena cahaya matahari selalu konstan. Namun, untuk menjaga konsistensi

dengan perekaman *indoor*, sebaiknya tetap gunakan 50 fps.

3. Jangan biarkan objek terkena cahaya secara langsung, karena bayangan yang terlalu kontras bisa mengganggu fokus penonton. Sebaiknya gunakan *diffuser* seperti kain putih transparan atau kertas putih supaya bayangan yang jatuh pada objek terlihat lebih lembut (lihat Gambar 3). Jika syuting *outdoor*, pilih waktu saat mendung, atau saat *golden hour* (kira-kira satu jam sesudah matahari terbit atau satu jam sebelum matahari terbenam).

COLOR GRADING

Color grading merupakan proses pengolahan warna setelah film selesai diedit. Film akan 'diwarnai' ulang untuk menjaga konsistensi atau memberikan makna tertentu pada suatu adegan. Jika film tidak melalui proses ini, maka penonton akan terganggu dengan ketidakkonsistenan warna dalam film, sehingga tidak bisa fokus dengan ceritanya. Bagaimana menerapkan *color grading* yang sinematik?

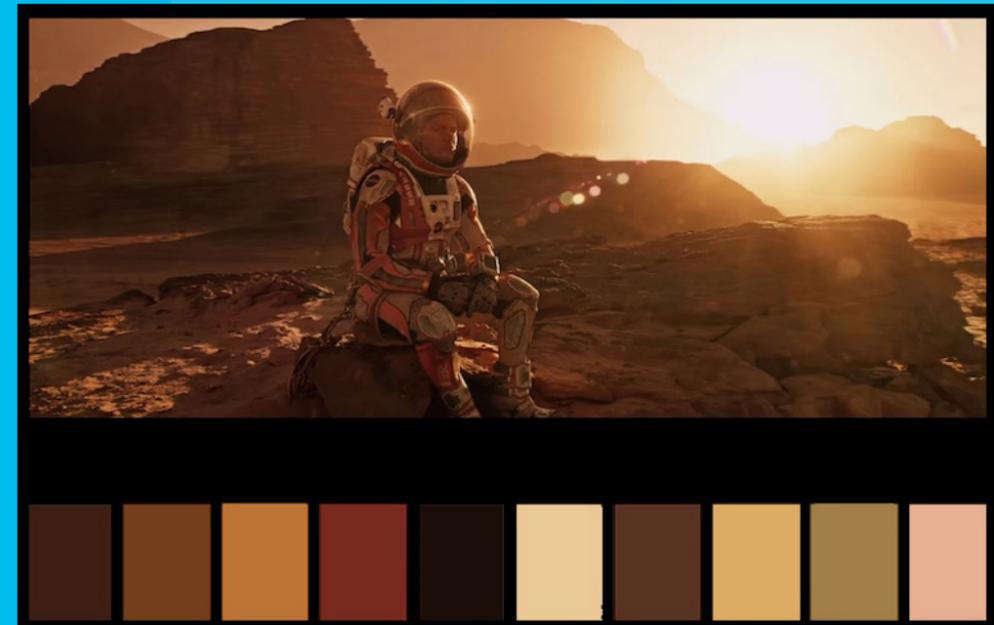
Penerapan *color grading* sebenarnya tergantung selera sang pembuat filmnya. Meski *color grading* yang sinematik sendiri sebenarnya tidak ada yang baku, namun cara mudahnya, efek sinematik bisa dicapai dengan cara menurunkan tingkat kontras dan menghindari warna hitam yang terlalu gelap. Perhatikan Gambar 4, jika kita mengambil sample warna hitam dari film-film tersebut, tidak ada yang mencapai warna hitam pekat atau hitam dengan kode warna #000000. Selain itu, bisa juga dengan cara sedikit menurunkan saturasi warna agar gambar tidak terlalu terlihat mencolok.

Gambar 3
Penggunaan diffuser



Sumber: <https://photography.tutsplus.com>

Gambar 4
Penerapan Color Grading pada Film The Martian (2015)



Gambar 5
Penerapan Color Grading pada Film Moonrise Kingdom (2012)



Gambar 6
Penerapan Color Grading pada Film The Avengers (2012)



Gambar 7
Penerapan Color Grading pada Film Lost in Translation (2003)



Nah, itu tadi adalah tips dan trik supaya video yang kita buat menjadi terlihat lebih sinematik. Jika kita meluangkan waktu sejenak untuk membuat sedikit perencanaan sebelum syuting, tentunya kita akan menghasilkan video yang lebih berkualitas. Selamat mencoba!

ANDI NUR SYAMSUDIN

BIKER BERKAH

the series

*Menampar diri, melihat jalanan tak pernah sepi,
memendarkan gejolak hati*



KASIHANKAH?

Kasihannya ya, pencari nafkah di kota besar. Dari sudut kota, mereka harus berangkat pagi-pagi. Mengebut jadi makanan sehari-hari. Karena terlambat sedikit saja, para pesaing akan mengepung bertubi-tubi. Tanpa ampun, dibekap macet nan menggelayuti. Endusan asap tampil mengiringi. Miris. Hm... Sampai banyak mulut berucap, "Jangan mau deh, tinggal di kota besar." Ck ck ck...

Kasihannya ya, pencari nafkah di kota kecil. Dari sudut desa, mereka boleh jadi berangkat agak siang. Terbuai dengan udara segar penghalus bulu hidung, panorama indah nan renyah di sudut mata, juga kicauan burung plus jangkrik pemanja telinga. Jalan pun lapang membentang, tak lupa sawah luas turut menghampar. Tapi, jangan salah! Risiko kecelakaan lantaran terbuai suasana tergolong tinggi. Pembangunan jalan tak secepat perkotaan. Besarnya upah kerja pun tak setebal kota besar. Ck ck ck...

Kasihannya ya, orang naik motor. Asap membelit, angin mengipasi peparu, kulit menghitam legam, debu mengganggu pandang. Tampil apa adanya, saking alaminya, membuat pengendaranya terkungkung panas, gerah, sumpek, ribet, dan hasrat ngebut. Ngebut ini lebih diakibatkan oleh enggan pemotor berlama-lama. Gelagatnya pun merusuhi situasi sana-sini. Ck ck ck...

Kasihannya ya, orang naik mobil. Duduk manis, terlampau santai, tak hiraukan sekitar. Padahal lebih sering, mobil dimusuhi motor. Entah badannya yang bengkak nan besar, gerakannya yang lamban bila menyisiri gang, atau parkirnya yang sudah pasti habiskan tempat. Namun, bila terbenam macet, maka usai sudah sepak-terjangnya. Sang sopir pun seolah terpenjara dalam perlahan-lahan jalan. Pasrah. Penumpang tak terkecuali, bosan membuntuti mobil lain. Ck ck ck...

Kasihannya ya, orang naik angkutan kota. Duduk tak semanis madu. Tak bisa senikmat naik kendaraan sendiri.

Tentu karena berhentinya harus selalu mengingatkan sopir. Coba kalau tidak! Pasti begitu masuk angkot langsung ditinggal tidur. Lebih sering, berdirinya tak sampai model. Tentu karena harus berdesakan dan rasakan gerah. Keringat berkumpul, peluh menguap, belum lagi menyedot kantong dompet lebih cepat. Apapun itu, selalu ada rasa enggan kalau sudah ketemu angkot. Ck ck ck...

Lima kasihan dihimpun dari berbagai kacamata. Sayang, komentarnya bersatu, tegas, teguh. Padahal, semua tak bisa dihukumi satu simpulan saja. Negatif. Karena takkan mungkin seseorang melihat semuanya penuh negativitas, hingga akhirnya tak mengambil pilihan satu pun. Buktinya jelas, ada yang bekerja di kota, ada pula di desa. Ada yang bekerja naik motor, ada pula naik mobil, juga angkot. Lalu, bagaimana rasa kasihan bisa mereka terjang?

Oh, inilah pengorbanan. Pengorbanan yang takkan mengenal rasa kasihan kepada diri. Karena ada pati-rasa yang mengharganya. Seperti motor yang meskipun gerah dan panas, ada kenikmatan tersendiri bila menafkahi istri-anak melaluinya. Seperti juga angkot yang meskipun penuh dan sesak, ada nilai ibadah yang hendak direngkuh pencari nafkah dunianya. Bahkan pemobil pun, walau harus memenuhi badan jalan, mereka berpikir bagaimana menyejahterakan hidup lebih baik lagi.

Kalau sudah tak ada kasihan pada diri, selayaknyalah tak ada kasihan buat orang lain. Yang ada justru 'salut'. Ada motor yang pengendaranya menafkahi anak-istri, ada mobil yang sopirnya memikirkan ekonomi masyarakat, ada angkot yang pengendaranya membantu para pencari nafkah pagi.

Sejatinya ada pengait dari itu semua, sekaliber pencari nafkah yang berjualan di pinggir jalan, menggotong tangga dan lemari, menjinjing dagangan, menarik gerobak, menjajakan ke pelanggan. Semua tak selayaknya ada kasihan. Seharusnya 'salut' berbalutkan 'doa', "Ya Tuhan, jadikan kami semua pengukir ibadah

nafkah-Mu! Yang mampu melihat segala kebaikan dari yang kasihan-kasihannya."

KERAJAAN JALANAN

Jalanannya ibarat kerajaan. Di dalamnya hadir berbagai karakter kerajaan dengan varian tingkah lakunya. Coba kita telisik siapa saja yang memerankan tokoh-tokoh kerajaan dari pribadi para pengguna jalan ini. Siapakah yang sejatinya menjadi rakyat, bendahara, sekretaris, prajurit, budak, hingga sang raja.

Kita mulai dari anggota terbanyak kerajaan, yaitu rakyat. Sosok ini tampil mewujudkan sekumpulan manusia yang terangkum dalam satu, dua, atau sedikit kendaraan. Bukan apa-apa, memang beginilah kebiasaan mereka. Merelakan diri berdesakan dalam sesaknya angkutan umum. Akant tetapi, mereka paham akan sesaknya kerajaan. Sehingga mereka merasa perlu naik angkutan ketimbang kendaraan pribadi. Daripada yang lebih ribet, mereka memilih yang cukup saja.

Sosok rakyat juga berasal dari golongan penikmat angkutan umum lantaran tak punya kendaraan pribadi. Maka, angkutan ini telah menjadi satu-satunya pilihan dan tiada dua. Dari dua tipe rakyat yang sama-sama pro-angkutan umum tetapi motifnya beda ini ibarat membedakan si kaya dan si miskin. Nyatanya memang demikian. Terjadi ketidak-merataan kemampuan rakyat sebuah kerajaan. Yang satu merakyat tapi berduit, yang satu merakyat butuh santunan.

Anggota kerajaan yang kedua adalah sekretaris. Karakter ini ibarat pencatat, pembaca, tangan kanan raja. Unikunya, karakter ini menganggap berkendaranya sia-sia, sehingga ia perlu memanfaatkan waktu untuk membaca dan menulis. Tak jarang kita temukan mereka memperlambat jalan tanpa sebab. Namun, bila kita intip ke depan, ternyata sedang asyik dengan *gadget*-nya; lihat *story*, lagi *chat* teman, atau *follow* sejenak. Hati-hati menemukan tipe ini; biasanya menunduk dengan satu tangan di stang, satu tangan lainnya di *gadget*.

Anggota kerajaan yang ketiga berjuluk bendahara. Karakternya bisa ditebak; rajin menghitung dan menaksir. Jika sekretaris kerajaan terlihat *introvert* sibuk dengan *gadget*-nya, maka bendahara akan tampak *ekstrovert*, dengan mata jelalatan kemana-mana. Hm... Apa yang dilakukan? Atas titah raja, dia taksir harga gedung, rumah mewah, hingga mobil mentereng di sepanjang jalan. Membayangkan uang yang dimiliki, memimpikan itu semua. Kalau perlu, ia taksir lawan jenis yang berseliweran, membayangkan syahwat pikirannya. Hati-hati jika melihat pengendara yang suka melihat kesana kemari. Ia tipe bendahara. Berduit banyak, mencari inspirasi buat membeli dan memiliki benda-benda yang bertaburan di sepanjang jalan.

Anggota kerajaan selanjutnya adalah prajurit. Berbeda dengan rakyat yang pasrah dengan angkutan umum, mereka mengambil risiko berkendara dengan semangat meradang. Karakternya berfisik kuat, berperalatan lengkap, bersemangat menggebu. Mereka rajin membalap. Targetnya jelas; secepat mungkin, seefektif mungkin, namun tetap menjaga diri. Yakni, perlahan bila bertemu dengan rakyat banyak. Karena prajurit memang selayaknyalah melindungi rakyat. Kita bisa temui mereka berwujud motor-motor yang mengebut berdasarkan kebutuhan mereka. Waktu mereka tipis.

Nah, anggota kali ini terdaftar paling bawah. Ialah budak. Karena atas nama raja, mereka rela kerja berat, berrisiko tinggi, totalitas energi. Siapa mereka? Yakni sosok tukang ngebut yang tak beralasan dalam mengebut. Kalaupun ada, alasannya kekanak-kanakan. Biar keren, menang, semua kendaraan disalip. Padahal mereka tak sadar, siapa sebetulnya raja mereka? Hm... tak lain adalah setan. Budak yang ada dalam tekanan setan. Akan tetapi, baik sekretaris, bendahara, maupun prajurit; potensi diperbudak setan tak kalah rentan. Maka, pengendalian diri dan hati adalah kuncinya.

Lalu, siapa rajanya? Raja adalah kita, yang tak turut gegap nafsu setan, juga tak ikut-ikutan gelagat para anggota kerajaan yang godaan setannya rentan. Raja selalu berjalan pelan, santai, senang, bangga, seolah tak ada panutan lain selain dirinya. Raja jalannya itu pemengaruh, bukan terpengaruh. Bersikap tegas dan teguh dalam mengendalikan diri. Dalam memutuskan setiap tindakannya di jalan.

Jalanannya ibarat kerajaan. Di dalamnya hadir berbagai karakter kerajaan dengan varian tingkah lakunya. Siapakah yang sejatinya menjadi rakyat, bendahara, sekretaris, prajurit, budak, hingga sang raja.

ILUSTRASI : FREEPIK.COM

RIDWAN SIDIK KURNIAWAN

TAK HANYA LEZAT, ALPUKAT JUGA KAYA MANFAAT

Apa yang ada di pikiran anda ketika mendengar kata alpukat? Sebagian besar orang tentu langsung berpikir tentang jus alpukat. Tidak salah memang, buah alpukat termasuk salah satu buah favorit sebagai bahan baku minuman jus. Selain itu, alpukat juga sering dijadikan sebagai bahan pelengkap untuk berbagai makanan, salah satunya dijadikan sebagai bahan pelengkap dalam berbagai varian sushi, makanan yang berasal dari Jepang yang memiliki banyak penggemar. Namun tahukah anda, selain lezat untuk dikonsumsi, buah alpukat ternyata memiliki sederet manfaat bagi tubuh. Manfaat apa saja yang terdapat dalam buah alpukat? Di bawah ini merupakan beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan dari buah alpukat.

MENCEGAH PENYAKIT JANTUNG

Menurut *World Health Organization (WHO)*, penyakit jantung merupakan pembunuh nomor satu di dunia. Kolesterol tinggi di dalam tubuh yang berasal dari makanan yang kita makan disebut dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua kolesterol itu buruk bagi tubuh kita. Ada dua jenis kolesterol dalam darah, yaitu kolesterol jahat (LDL) dan kolesterol baik (HDL). Kolesterol jahat berasal dari makanan berlemak tinggi seperti gorengan dan *junk food*. Penumpukan kolesterol jahat membuat aliran darah dalam tubuh menjadi tidak lancar.

Lemak yang terdapat dalam buah alpukat berbentuk asam oleat yang merupakan lemak tak jenuh tunggal dan merupakan kolestrol baik. Mengonsumsi buah alpukat disertai dengan pola makan

yang sehat dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dan mengurangi kadar kolesterol jahat, sehingga dapat membantu menjaga kesehatan jantung.

MENCEGAH RESIKO KANKER

Kanker merupakan penyakit mematikan berikutnya setelah penyakit jantung. Kanker merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Buah alpukat dikenal memiliki senyawa antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas, yang dapat merusak DNA dalam sel dan tumbuh menjadi penyakit kanker. Mengonsumsi buah alpukat secara rutin dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker.

MENJAGA KESEHATAN MATA

Mata merupakan salah satu panca indera yang memiliki peran yang sangat vital sehingga perlu kita jaga kesehatannya. Buah alpukat diketahui memiliki kandungan lutein dan zeaxanthin yang mampu mengurangi kerusakan mata serta mencegah risiko terkena penyakit yang berhubungan dengan mata seperti katarak dan degenerasi makula. Mengonsumsi buah alpukat dapat membantu menjaga kesehatan mata dalam jangka panjang.

MENURUNKAN BERAT BADAN

Sebagian orang menganggap bahwa mengonsumsi buah alpukat akan menyebabkan berat badan menjadi naik karena buah ini kaya akan lemak. Tidak perlu khawatir, berbeda dengan lemak

jenuh yang cenderung mengendap dalam tubuh, lemak yang terdapat pada buah alpukat merupakan lemak tak jenuh tunggal yang mudah dibakar dan diubah menjadi energi.

Alpukat juga kaya akan serat alami yang membantu melancarkan pencernaan sehingga dapat membantu menurunkan berat badan secara efektif. Mengonsumsi buah alpukat juga dapat membuat perut terasa kenyang lebih lama sehingga dapat mengurangi nafsu untuk makan dan ngemil. Namun demikian, sebaiknya jangan mengonsumsi buah ini secara berlebihan karena nantinya malah dapat menambah asupan kalori yang berlebih di dalam tubuh dan menyebabkan kenaikan berat badan.

MENGHILANGKAN STRES

Sering merasa stres karena tuntutan pekerjaan atau hal lainnya? Hati-hati, jika tidak dikelola dengan baik, stres yang berkelanjutan akan dapat mengganggu kondisi kesehatan. Ada baiknya saat stres terjadi, anda melakukan kegiatan yang membuat pikiran menjadi rileks. Salah satunya adalah memakan buah alpukat. Alpukat memiliki kandungan asam folat dan vitamin B yang dapat menghilangkan stres, meningkatkan suasana hati dan mencegah terjadinya depresi.

MENCEGAH RISIKO DIABETES

Konsumsi alpukat juga dipercaya dapat mencegah risiko diabetes. Normalnya, tubuh akan memproses glukosa atau gula dalam darah menjadi energi. Proses ini terjadi otomatis dengan bantuan hormon insulin. Namun bagi penderita diabetes, tubuh tidak menghasilkan cukup hormon

insulin, atau hormon insulin tidak dapat menggunakan bekerja dengan efektif. Akibatnya gula menumpuk dalam darah, dan terjadilah diabetes. Asam oleat yang terdapat pada alpukat diyakini dapat membantu mencegah diabetes. Lemak tak jenuh dalam alpukat juga memiliki fungsi mengurangi kadar trigliserida dan mengontrol kadar gula darah.

BAGUS UNTUK KESUBURAN DAN IBU HAMIL

Asam folat mempunyai peran penting selama kehamilan, yakni berfungsi untuk mengatur dan memproduksi jalinan sel baru, sebagai nutrisi untuk membantu tumbuh kembang janin dalam kandungan, serta mencegah cacat janin. Selain itu, asam folat juga dapat meningkatkan kesuburan. Alpukat sangat baik dikonsumsi ibu hamil dan pasutri yang menginginkan keturunan karena buah ini merupakan salah satu sumber alami yang kaya asam folat.

MENCEGAH PENUAAN DINI

Kolagen adalah salah satu protein yang menyusun tubuh manusia. Salah satu fungsinya adalah sebagai pelembab alami tubuh. Dewasa ini, banyak kosmetik yang menggunakan kolagen di dalam produk mereka. Penggunaan tersebut diklaim terutama untuk menjaga kelembaban kulit sehingga dapat tampak lebih cerah. Kandungan kolagen juga terdapat dalam buah alpukat. Rutin menggunakan alpukat sebagai masker terutama pada wajah, dapat membantu mengencangkan dan meremajakan kulit serta mencegah penuaan dini.

PERAWATAN KULIT KEPALA

Tidak hanya digunakan sebagai masker wajah, buah alpukat juga dapat digunakan sebagai masker alami rambut. Nutrisi yang terdapat dalam buah alpukat dapat membantu merangsang pertumbuhan rambut. Selain itu, Vitamin E yang terdapat dalam buah alpukat dapat melindungi kulit dari radiasi berbahaya yang disebabkan oleh sinar matahari.

Berbeda dengan lemak jenuh yang cenderung mengendap dalam tubuh, lemak yang terdapat pada buah alpukat merupakan lemak tak jenuh tunggal yang mudah dibakar dan diubah menjadi energi.



FOTO: FREEPIK.COM

AZWAR
PELAKSANA BALAI DIKLAT KEUANGAN MAKASSAR

WONDERFUL MAKASSAR

Pembangunan di kota Makassar beberapa tahun belakangan menunjukkan perkembangan yang begitu pesat, tidak terkecuali pada sektor pariwisata. Beragam objek wisata yang ada menawarkan banyak hal untuk dieksplorasi, mulai dari wisata sejarah, budaya, sampai wisata kuliner khas Makassar yang terkenal dengan kelezatannya. Hal ini menjadikan kota ini makin ramai dikunjungi para pelancong. Makassar yang disebut Kota Daeng ini memiliki objek wisata unik yang *instagramable* dan *wonderful* dengan beragam makanan tradisionalnya.

PANTAI LOSARI

Mampir ke pantai yang berada di Jalan Penghibur ini sudah menjadi kegiatan wajib bagi setiap pengunjung yang datang ke Makassar. Tempat wisata andalan ini memiliki keunikan tersendiri. Jika biasanya pantai dikenal dengan pasirnya, Pantai Losari tidak memiliki pasir. Jika Anda datang, Anda akan menemui beton di tepiannya. Tidak ada pasir bukan berarti pantai ini tidak layak dikunjungi, ada banyak hal lain yang menarik dari tempat wisata ini. Di sini, Anda bisa melakukan banyak hal yang menyenangkan seperti memancing, naik sepeda air maupun *Banana Boat*, berlayar dengan perahu, dan masih banyak lagi.



SUNSET PANTAI LOSARI
FOTO : KLANEWS.ID (2019)

MASJID TERAPUNG

Masjid Terapung terletak di ujung barat Kota Makassar, di sisi sebelah kanan Pantai Losari. Masjid ini bernama Masjid Amirul Mukminin. Umat muslim dapat beribadah di masjid kebanggaan kota Makassar ini dengan ditemani angin sepoi-sepoi pantai yang sejuk.

BENTENG ROTTERDAM

Benteng Rotterdam ini berada tidak jauh dari kawasan Pantai Losari. Benteng ini merupakan salah satu peninggalan sejarah Kerajaan Gowa-Tallo yang dibangun pada tahun 1545 oleh raja ke-9. Pada awalnya, benteng dibangun dengan menggunakan tanah liat dan putih telur. Bangunan disempurnakan oleh raja ke-14. Jika dilihat dari atas, bentuk benteng ini menyerupai seekor penyu yang sedang merangkak ke arah laut. Penyu dipilih sebagai penggambaran benteng ini karena binatang ini dapat hidup di air dan di darat, hal ini sesuai dengan Kerajaan Gowa-Tallo yang berjaya di lautan maupun daratan.

Pada zaman Belanda, benteng ini digunakan sebagai tempat penyimpanan rempah-rempah hasil rampasan dari Indonesia bagian timur. Di dalam kompleks benteng, terdapat tiga belas bangunan dan lima buah menara dengan sebuah menara di pintu masuk sedangkan empat buah menara lainnya ada di setiap sudut kawasan benteng. Ada juga sebuah museum yang disebut Museum La Galigo yang berisi koleksi benda-benda



MASJID TERAPUNG
FOTO : ANWAR MAJID (2018)

sisa kebesaran kerajaan dahulu. Selain itu, ada sebuah ruangan yang diyakini sebagai tempat pengasingan Pangeran Diponegoro.

TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG

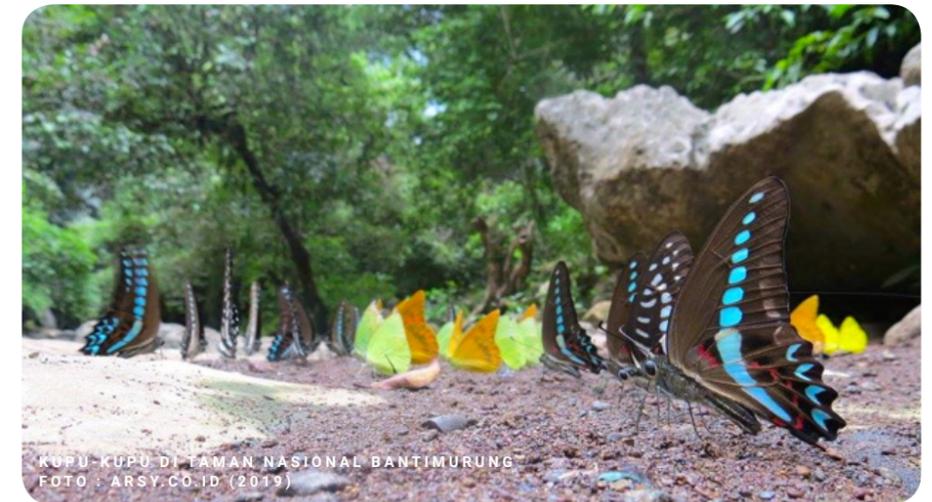
Taman Nasional Bantimurung berada di Kabupaten Maros atau sekitar 45 km dari pusat kota Makassar. Tempat wisata ini luasnya mencapai 43.750 hektar dengan wilayahnya yang melingkupi bukit kapur, air terjun, dan juga gua. Taman nasional ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli botani dari Inggris, Alfred Russel Wallace. Saat itu, Wallace menyebut tempat ini sebagai kerajaan kupu-kupu karena ada sekitar 250 jenis kupu-kupu di sini. Kupu-kupu memang dijadikan maskot bagi tempat wisata ini. Di sini, Anda bisa melihat berbagai jenis kupu-kupu mulai dari yang masih berupa ulat, kepompong sampai berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Hal mengasyikkan lain yang bisa Anda lakukan adalah bermain *flying fox*, berenang di kolam, bermain di bawah air terjun, dan bisa juga menjelajahi gua yang ada di kawasan ini.

MALINO

Malino adalah tempat wisata yang berada di dataran tinggi dan menawarkan panorama khas pegunungan. Kawasan ini berada sekitar 90 km dari pusat

PANTAI TANJUNG BIRA

Pantai ini berada di sekitar 200 km dari kota Makassar. Jarak ini tidak akan berarti saat Anda sudah menginjakkan kaki di atas pasirnya. Tanjung Bira terkenal dengan pasirnya yang lembut dan putih serta airnya yang jernih kebiruan. Keindahan tempat wisata ini tidak hanya dikenal oleh wisatawan domestik saja, tetapi juga wisatawan mancanegara. Mereka biasa berenang, berjemur, *snorkeling* atau hanya duduk menikmati pemandangan terbit dan tenggelamnya matahari. Fasilitas di sini cukup lengkap, mulai dari penginapan, restoran, dan juga kamar mandi untuk membersihkan diri setelah berenang.



KUPU-KUPU DI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG
FOTO : ARSY.CO.ID (2019)

kota Makassar. Selama perjalanan menuju Malino, Anda akan melewati pemandangan hutan pinus dan batu kapur yang indah. Malino berada di ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut. Suhu udara di sini berkisar antara 10-26 derajat Celcius, jangan sampai lupa membawa jaket dan pakaian hangat Anda. Di sini, ada banyak air terjun yang indah seperti Air Terjun Seribu Tangga dan Air Terjun Takapala. Selain itu, ada juga kebun teh, lembah biru dan bunker peninggalan Jepang. Sebelum pulang, sempatkan untuk membeli oleh-oleh khas tempat wisata ini seperti dodol ketan, *tenteng*, buah markisa, dan apel.

JALAN SUMBA OPU

Jalan Somba Opu merupakan tempat yang wajib dikunjungi ketika pergi ke kota Makassar. Jalan Somba Opu ini ramai digunakan sebagai tempat menjual dan mencari oleh-oleh khas Makassar, mulai dari kerajinan, makanan khas, sampai dengan Minyak Gosok Cap Tawon. Lokasi tempat ini tidak jauh dari Pantai Losari dan Benteng Rotterdam.



PERKEBUNAN TEH DI MALINO
FOTO : KSMTOUR.COM (2018)



PANTAI TANJUNG BIRA
FOTO : KSMTOUR.COM (2018)



SALAH SATU TOKO DI SUMBA OPU
FOTO : INISAYADANHIDUPSAYA.WORDPRESS.COM (2019)

KULINER KHAS MAKASSAR

Makassar menawarkan banyak jenis makanan khas yang bisa membuat Anda ketagihan dan rindu datang kembali ke kota ini. Jika berada di Kota Daeng ini, jangan lupa sempatkan waktu untuk menyambangi beberapa destinasi wisata kuliner paling *recommended* berikut ini.

1. Coto Nusantara

Belum ke Makassar kalau belum berwisata kuliner mencicipi penganan khas yang sudah terkenal seantero negeri ini. Coto merupakan makanan yang terdiri atas isi perut sapi yang sebelumnya telah direbus lama. Rebusan ini kemudian dicampur dengan daging sapi lalu diiris dan diberi bumbu kacang. Coto belum lengkap apabila tidak disantap bersama ketupat.

Salah satu warung makan di Makassar terfavorit untuk menyantap menu Coto Makassar adalah Coto Nusantara. Bahkan, tempat wisata kuliner Makassar satu ini sering dikunjungi para artis yang sedang bertandang ke Makassar.

2. Sop Konro dan Iga Bakar Karebosi

Para pecinta iga sapi wajib menyambangi destinasi wisata kuliner khas Makassar yang satu ini, konro. Tulang iga diolah dengan cara direbus atau dibakar dan dihidangkan dalam kuah kaldu sup. Iga bisa diolah menjadi menu yang menggoda lidah dan variatif. Tersedia menu iga bakar dengan siraman bumbu kacang dan sup konro yang merupakan iga rebus yang disiram kuah dengan rempah-rempah pilihan. Demi menjaga cita rasa makanan, tulang iga dimasak terpisah dengan bahan-bahan lain seperti lengkuas, daun salam, bawang merah, bawang putih, dan kacang tanah.

3. Pallubasa Onta

Pallubasa merupakan sebuah makanan tradisional khas Makassar yang berbahan dasar daging sapi, jeroan sapi atau kerbau, dengan cita rasa kuat berkat kuah dan telur ayam kampung sebagai pelengkap. Cita rasa gurih Pallubasa berada di dagingnya yang sebelumnya telah diolah menggunakan rempah-

rempah kemudian disiram kuah. Pallubasa Onta adalah tempat makan favorit yang menyajikan hidangan pallubasa yang lokasinya ada di Jalan Onta, Kota Makassar.

4. Sop Saudara

Sop Saudara dapat dengan mudah ditemukan di pinggir-pinggir jalan kota Makassar. Sop Saudara berasal dari Pangkep, yang letaknya 60 km dari pusat kota Makassar. Sop Saudara biasa disajikan dengan ikan Bolu (Bandeng) yang dibakar dan ini merupakan kombinasi yang tidak dapat terpisahkan.

Salah satu tujuan wisata kuliner Makassar yang menyediakan menu Sop Saudara adalah Warung Pangkep Sop Saudara. Nama Pangkep sengaja dipertahankan agar identitas asli makanan ini tetap terjaga. Warung makan yang berada di Jalan Dokter Wahidin Sudiro Husodo selalu ramai pengunjung. Buktinya, sering terjadi antrian akibat tempat duduk yang telah penuh terisi. Selain Sop Saudara, Anda juga dapat mencicipi wisata kuliner khas Makassar yang gak kalah memanjakan lidah, antara lain Konro, Kikil, Paru dan Lidah. Warung makan ini buka 24 jam.

Nah, mau ke Makassar? Mari, Anda akan dijamu dengan keramahannya yang *wonderfull*!



IGA BAKAR
FOTO: NIBBLE.ID (2019)



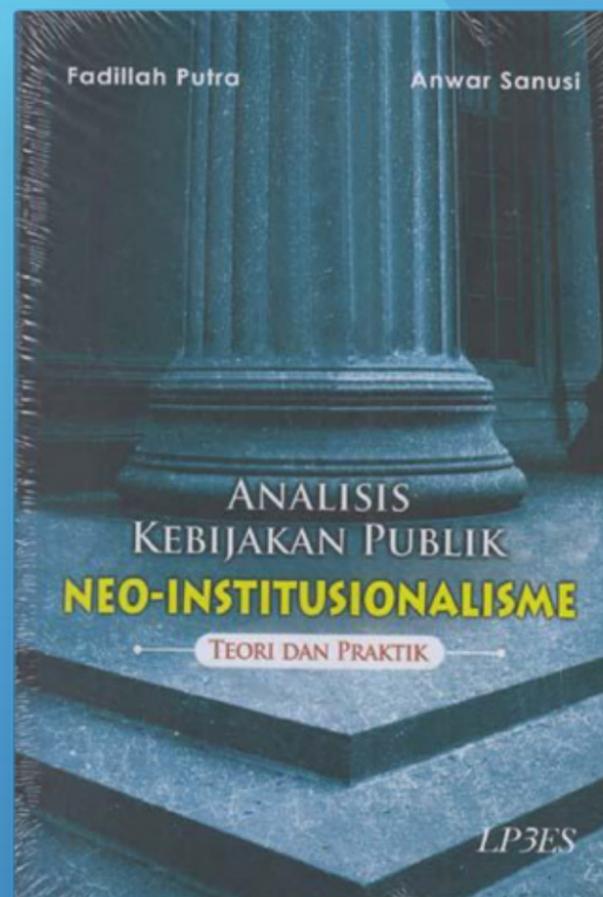
PALLUBASA DI JALAN ONTA
FOTO: TRAVELINGYUK.COM (2019)



SOP SAUDARA
FOTO: ANWAR MAJID (2019)

AGUNG DARONO
WIDYAISWARA PUSDIKLAT PAJAK

INSTITUSI DALAM ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK



PENULIS : FADILLAH PUTRA DAN ANWAR SANUSI
EDITOR : NARESH MALHOTRA
PENERBIT : LP3ES - JAKARTA
TAHUN TERBIT : 2019
TEBAL BUKU : XI + 302

Analisis kebijakan publik merupakan kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu terkait masalah-masalah publik. Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menetapkan jabatan analis kebijakan. Buku ini berangkat dari asumsi bahwa aktivitas analisis kebijakan publik (terutama yang dilakukan oleh pejabat analis kebijakan), membutuhkan penjelasan tentang bagaimana suatu analisis kajian dilakukan (epistemologi) sehingga menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan.

Penulis buku ini berpandangan bahwa analisis kebijakan di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai dasar dan perangkat konseptual, teori, maupun metodologi yang kokoh. Secara implisit, buku ini bertujuan spesifik untuk memberikan penguatan kerangka berpikir dan metode analisis bagi jabatan fungsional analisis kebijakan di instansi pemerintahan yang telah ditetapkan sejak 2013 (hal. 1; 10-11). Buku ini menawarkan neo-institusionalisme sebagai dasar teoritis yang dapat digunakan untuk melaksanakan analisis kebijakan publik. Kerangka pemikiran yang diajukan adalah bahwa untuk menuju Indonesia yang lebih baik maka transformasi kelembagaan terutama untuk sektor pemerintahan adalah suatu keniscayaan. Transformasi kelembagaan itu akan dapat diwujudkan antara lain dengan mengajukan kerangka kerja atau model analisis yang merujuk kepada institusionalisme sebagai bagian dari berbagai analisis dan selanjutnya penetapan kebijakan publik yang dilaksanakan oleh para penentu kebijakan publik.

Bagian awal buku (Bab 1-3) ini terlebih dulu mengajukan argumentasi untuk membedakan antara kerangka pikir (*framework*), teori dan model dalam analisis kebijakan publik. Penekanan diletakkan pada pentingnya analisis kebijakan publik memahami interaksi ketiga hal tersebut secara utuh sehingga mendapatkan akumulasi pengetahuan yang dapat digunakan sebagai pijakan

dalam melakukan analisis kebijakan. Uraian selanjutnya terkait dengan pentingnya rujukan dasar teori sebagai pijakan untuk memahami fenomena sosial sebagai bagian inheren dari analisis kebijakan. Teori yang diajukan dalam buku ini adalah neo-institusionalisme.

Neo-institusionalisme merupakan lanjutan dari institusionalisme sebagai salah satu dari teori utama yang digunakan untuk menganalisis fenomena sosial (berbagai masalah publik). Dua teori yang lain itu adalah behaviorisme dan strukturalisme. Perbedaan di antara ketiganya terletak pada cara pandang terhadap manusia sebagai agen/aktor sosial dengan struktur yang berada di luar diri (aturan, tata nilai, kebiasaan, dan yang serupa dengan itu) sang aktor. Sejauh mana manusia yang mempunyai akal budi dan kehendak berperilaku tertentu untuk mencapai tujuannya dalam hubungannya dengan manusia lain dalam sebuah tatanan sosial. Apakah kehendak itu bisa terlaksana semata-mata karena keinginan individual sang aktor, atau dalam kenyataannya harus menghadapi sebuah struktur yang dapat mengekang kehendaknya.

Behaviorisme adalah paham yang menekankan bahwa tindakan atau perilaku manusia didasari oleh motif dan karakter pribadinya yang terlepas dari struktur yang melingkupinya. Sementara itu dalam pandangan teori strukturalisme dan institusionalisme tindakan manusia lebih ditentukan oleh situasi struktur atau institusi yang berada di luar dirinya. Perbedaan antara strukturalisme dengan institusionalisme terletak pada cara pandang terhadap struktur. Strukturalis berpendapat bahwa struktur hadir dalam sebuah lingkungan, tidak diciptakan. Tidak demikianya dengan kalangan institusionalis yang lebih mengedepankan institusi sebagai struktur yang terakutalisasi dan teroperasionalisasi (hal. 35). Para institusionalis berkeyakinan bahwa bentuk dasar dari semua interaksi antar-manusia. Institusilah, dengan berbagai bentuknya seperti keluarga, agama, pemerintahan, pasar, organisasi, dst. yang dapat mewujudkan interaksi sosial yang teratur (hal. 32). Uraian tentang teori utama ini memicu sedikit diskusi. Pembahasan tentang kedudukan

agen (aktor) dengan struktur ini terasa ada yang kurang karena tidak dilengkapi dengan perbandingan ketiga teori tersebut dengan kerangka pemikiran dualitas-struktur yang diajukan oleh Anthony Giddens ataupun *actor-network theory* yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu.

Neo-institusionalisme merupakan istilah untuk mempertajam analisis (*old-*)institusionalisme. Perbedaan keduanya terletak pada fokus observasi. Institusionalisme memfokuskan observasinya pada institusi formal seperti ketentuan perundangan, prosedur standar, organisasi formal. Neo-institusionalisme kemudian memperluas fokus tersebut pada kesepakatan, sistem nilai ataupun adat kebiasaan. Sisi lain yang berbeda adalah orientansi studi institusionalisme yang cenderung deskriptif sementara itu neo-institusionalisme mengembangkan lagi lebih jauh dengan menambahkan kajian yang menghubungkan dampak institusi dan peranan aktor. Neo-institusionalisme juga melengkapi kajiannya dengan pengamatan tentang perubahan institusi baik formal atau informal.

Pada bagian selanjutnya (Bab 4-7) menguraikan gambaran umum neo-institusionalisme disusul uraian yang cukup detail tentang berbagai subtema yang ada dalam neo-institusionalisme. Kemudian, setiap subtema tersebut diuraikan dalam kaitannya dengan analisis kebijakan publik, terutama dalam kedudukannya sebagai landasan teoritis untuk nantinya dapat digunakan dalam mengembangkan kerangka pemikiran dan juga model dari analisis kebijakan yang dikerjakan

Subtema neo-institusionalisme yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam buku ini adalah pilihan rasional, institusionalisme sosiologis, institusionalisme historis dan institusionalisme diskursif. Terdapat masing-masing satu bab tersendiri untuk membahas setiap subtema tersebut. Pola penjelasan untuk setiap subtema juga realtif baku, dengan sistematika berupa: gambaran umum tentang subtema, peran institusi, proses kebijakan publik, aplikasi setiap subtema terkait untuk lingkup analisis kebijakan publik, dan kritik yang terkait dengan subtema.

Hal yang cukup menarik untuk diberikan perhatian khusus dari buku ini adalah upaya agar konsep yang disajikan dapat diaplikasikan dalam praktik sehari-hari dalam analisis kebijakan. Untuk tataran implementasi teknis, buku ini juga dengan lampiran yang berisi tentang penyusunan hasil kajian dalam format telaah staf (hal. 266-270) dan laporan analisis kebijakan (hal. 271-275). Tentu contoh aplikasi ini akan lebih komprehensif jika dilengkapi dengan penyajian hasil analisis kebijakan dengan format *policy brief* ataupun *policy paper*.

Catatan lain yang perlu juga disampaikan untuk penyajian contoh kasus yang menyatu dalam uraian (teks) dalam suatu bab. Saran yang diajukan adalah adanya penjelasan dalam bentuk "box" sehingga memungkinkan untuk menyajikan satu atau beberapa kasus atau contoh secara komprehensif dan sistematis. Lihat misalnya di hal. 9 yang menguraikan kasus implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), atau hal. 35 tentang pembentukan *Asean Free Trade Area* (AFTA). Kedua kasus tersebut akan lebih menarik jika dilihat sebagai *case-in-point* dengan perspektif analisis kebijakan publik dan dituangkan secara khusus dalam format "box". Pembaca akan lebih dimudahkan dengan membaca uraian kasus tersebut sebagai bagian yang otonom dengan tetap memperhatikan konteksnya dengan pokok bahasan utama di bab tersebut.

Sebagai penutup, penulis buku ini secara tegas dan sadar telah memilih untuk aliran pemikiran neo-institusionalisme yang diambil yaitu: pilihan rasional, sosiologis, historis dan diskursif. Harapannya adalah di masa yang akan datang juga terbit versi bahasa Indonesia beberapa aliran dalam neo-institusionalisme yang lain, seperti tekanan-, logika-, kompleksitas-, komparasi-, atau politik-institusional. Adapun diskusi ekonomi institusional yang membahas bagaimana biaya transaksi juga menjadi bagian dari analisis kebijakan publik. Beberapa hal tersebut adalah pokok bahasan dalam dalam neo-institusionalisme yang belum tersentuh oleh buku ini.

GALERI

FOTO: HAMZAH ZAKARIYA



DENPASAR

MUDA MUDI DESA TAMBLINGAN DI SEKITAR PURA ULUN DANU, TERLETAK DI SEBELAH DANAU TAMBLINGAN, TERLIHAT ASYIK BERLATIH ALAT MUSIK DAN BELAJAR TARI KECAK



AKSI TOKOH RAHWANA DALAM CERITA TARI KECAK DI ULUWATU



PEKAN KESENIAN BALI DI MONUMEN BAJRA SANDHI, RENON



JEMBATAN DI TENGAH HUTAN MANGROVE, DENPASAR



MENIKMATI TEH PAGI DENGAN LATAR BELAKANG GUNUNG BATUR

KANG EDU

CERITA & ILUSTRASI : BIMO ADI



SAYANGI BUMI KITA WUJUDKAN ECO OFFICE

1. Kurangi sampah plastik & kertas



2. Hemat Energi Listrik



3. Hemat Penggunaan Air



4. Jaga Kebersihan Ruang Kerja

SE-6/MK.1.2019

**Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Program Eco Office)
di Lingkungan Kementerian Keuangan**

ISSN: 2086-4833



KEMENKEU CORPU TV

Layanan Live Streaming dan Broadcasting BPPK

diakses melalui laman: bppk.kemenkeu.go.id



FOLLOW US:

